

TAHURA - Terdakwa I Wayan Rubah dipapah menuju ruang persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (12/2) kemarin. Terdakwa disidangkan untuk mendengarkan putusan terkait kasus Tahura.

Kasus Korupsi Tahura

Kakek 83 Tahun

Dihukum Empat Bulan

Denpasar (Bali Post) -

Terdakwa I Wayan Rubah, Selasa (12/2) kemarin dihukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh majelis hakim pimpinan Angeliky Handajani Day, kakek berusia 83 tahun itu dihukum selama empat bulan penjara. Di samping hukuman fisik, majelis hakim juga menghukum terdakwa yang sudah renta dan mesti dipapah saat berjalan itu dengan pidana denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan lebih-lebih subsider dan melanggar Pasal 13 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Menyatakan terdakwa Wayan Rubah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, dakwaan subsider dan lebih subsider. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan primer, subsider dan lebih subsider," putus hakim.

Namun, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan lebih-lebih subsider. Atas putusan itu, baik terdakwa maupun jaksa langsung menerima. Memang putusan tersebut lebih rendah dua bulan dibandingkan tuntutan jaksa. JPU Wayan Suardi sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum selama enam bulan.

Sementara itu, Wayan Rubah didampingi kuasa hukumnya, Ida Bagus Ngurah Darmika, menyatakan atas vonis itu Wayan Rubah langsung bebas murni. Pasalnya, sejak delapan bulan lalu terdakwa sudah menjalani tahanan kota. "Jika dihitung 2/3 tahanan kota, itu lima bulan. Jadi setelah vonis ini, Pak Rubah langsung bebas," tandas Darmika.

Wayan Rubah mengaku senang atas putusan majelis hakim. Ia juga sempat mengaku trauma jika sampai masuk LP Kerobokan, karena dia sakit-sakitan, selain usia sudah lanjut dan pendengarannya mengalami gangguan. Atas vonis hakim, dia juga berharap gaji pensiunannya dibuka. Rubah adalah pensiunan Angkasa Pura.

Sebelumnya I Wayan Rubah (83) didakwa korupsi sertifikasi lahan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) di Lingkungan Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Terdakwa disebut ingin memiliki sebagian dari tanah Tahura menggunakan jasa pengurusan tanah kepada almarhum I Gede Putu Wibawajaya. Pengurusan tanah melalui jasa Wibawajaya itu dilakukan dengan menggunakan surat kuasa tertanggal 16 Juni 2014. Selanjutnya, mengurus jual beli berbekal Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No 216 alamat Banjar Pararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 51.03.050.004.004-013.0 dengan luas 847 meter persegi atas nama terdakwa dan menunjukkan tanah Tahura tersebut seolah miliknya. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 4.860.000.000. (kmb37)

Edisi : Rabu, 13, Feb, 2019

Hal : 2



Retribusi Meningkatkan 100 Persen

● Evaluasi Pungutan Sandar Kapal di Danau Batur

BANGLI, TRIBUN BALI - Besaran tarif retribusi sandar kapal pada sejumlah dermaga di sekitaran Danau Batur, Bangli dirasa terlalu kecil serta tidak layak. Hal ini sampai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak dua tahun terakhir.

Kepala Dinas Perhubungan Bangli, I Gede Arta mengatakan, BPK menilai retribusi sandar sudah tidak layak sehingga perlu evaluasi untuk penyesuaian. "Rendah sekali. Karena sudah hampir 10 tahun retribusi sandar tidak ada peningkatan. Sebab itu kami disarankan agar besaran retribusi dievaluasi kembali melalui revisi perda," ucapnya, Selasa (12/2).

Sesuai usulan, tarif retribusi sandar ditingkatkan 100 persen. Dari semula Rp 500 per meter per segi, menjadi Rp 1000 per meter persegi atau besaran tarif dikali panjang kapal. Tarif sandar ini berlaku pada kapal yang bersandar di tiap dermaga.

Di lain sisi, Gede Arta menegaskan peningkatan tarif retribusi sandar tidak akan memberatkan para pemilik usaha jasa penyeberangan

di sekitaran Danau Batur, yang notabene adalah masyarakat sekitar. Sebab peningkatan tarif akan menyesuaikan dengan ongkos jasa.

"Oh tidak. Itu hanya berpengaruh di wisatawan saja. Kalau naiknya lagi Rp 500, ya jasa penyeberangan menyesuaikan. Jadi tidak memberatkan masyarakat si pengusaha. Ini (ongkos jasa) akan dievaluasi juga standarnya," ucap Gede Arta.

Peningkatan tarif retribusi sandar, erat kaitannya dengan fasilitas dermaga yang tersedia di sekitaran Danau Batur. Pasalnya, sejumlah dermaga kondisinya saat ini tidak layak. Dermaga Kedisan misalnya, bagian dermaga berbahan kayu saat ini kondisinya telah lapuk. Demikian pula dengan dermaga Desa Terunyan yang tersisa bagian betonnya saja akibat peluapan Danau Batur.

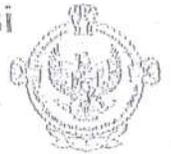
Terkait hal tersebut, Gede Arta menjelaskan, peningkatan tarif retribusi sandar tidak sekadar persoalan fasilitas dermaga, namun juga pada pelayanan dan pengawasan di sekitaran Danau Batur. Seperti penentuan batas maksimal daya angkut boat, serta penentuan buka dan tutupnya jasa penyeberangan ber-

dasarkan cuaca sekitar.

"Termasuk jika terjadi sesuatu, kami yang paling bertanggung jawab disana. Jadi jika melihat secara luas peningkatan tarif ini tidak sebatas di retribusi dermaga saja. Peningkatan tarif ini sudah termasuk dengan jasa operasional lainnya yang kami berikan," bebernya.

Soal fasilitas, Gede Arta mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan rencana revitalisasi pada sejumlah dermaga pada tahun 2020 mendatang. Terhadap rencana itu, pihaknya juga mengaku sudah mengantongi *Detail Engineering Design* (DED). Peningkatan tarif retribusi ini berimbang pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana estimasi PAD yang dihasilkan dari retribusi hanya Rp 30 juta tiap tahunnya.

"Jumlah ini tentu akan bertambah seiring dengan peningkatan tarif yang saat ini sedang digodok perdanya, dengan estimasi peningkatan hingga 100 persen. Yakni di kisaran angka Rp 50 juta hingga 70 juta. Tapi jumlah itu tergantung dari besar kecilnya jumlah kunjungan wisatawan," tandasnya. (mer)



PENATAAN PURA ULUWATU Digelontor Rp 29 Miliar Lebih

MANGUPURA- Kondisi dinding Pura Luhur Uluwatu, Pecatu, Kuta Selatan sempat diisukan mengalami keretakan. Pemerintah Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung tengah membuat kajian untuk penataan dinding Pura Luhur Uluwatu. Penataan untuk penguatan dinding tebing digelontor dengan anggaran sebesar Rp 29 miliar lebih.

Kepala Dinas PUPR Badung Ida Bagus Surya Sumba menjelaskan, untuk penanganan keretakan dinding Pura Uluwatu, pihaknya saat ini masih melakukan tender untuk membuat manajemen konstruksi (MK). Kemudian setelah ada penetapan MK, pihak MK ini akan menyusun semacam desain konsep. Desain konsep ini yang nanti untuk menjadi bahan tender *desain and build*. "Setelah ada pemenang kontraktor, kontraktor ini terlebih dahulu kerjanya mensurvey kondisi eksisting, kemudian dia mendesain dan dari kondisi desain itu baru diajukan ke kita sebagai owner dan kalau sudah di acc baru dikerjakan," terang Surya Sumba saat ditemui di Gedung Dewan, Selasa (12/2).

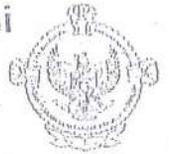
Ia menargetkan bahwa penguatan dinding Pura Uluwatu harus sudah tuntas diakhir tahun 2019. "Kita belum tahu berapa lama (pihak kontraktor) membuat desainnya. Yang jelas Desember ini harus sudah tuntas dikerjakan," terang birokrat asal Tabanan ini.

Mantan Kabid Jalan dan Jembatan ini mengakui, meski ada tanda keretakan, namun jenis dan besar retakan belum pernah diketahui. Makanya pihaknya sebelum melakukan penanganan harus ada test terlebih dahulu. "Kita *kan* belum tahu seberapa berat keratakannya. Nanti ada alat yang mengukur berapa dalam retaknya. Apakah memang keretakan yang sampai tembus, atau terdiri dari bantuan besar diapit dua bantuan kecil, kemudian di dalamnya ada batuan besar lagi. Nah, ini penanganannya seperti apa. Nanti *kan* ditarit. Nanti secara teknis *kan* ada," tegasnya.

Sejauh ini ia belum bisa memastikan akan seperti apa penanganan tebing Pura Uluwatu. Pasalnya, masih menunggu hasil kajian. "Tunggu saja. Yang pasti sudah kita siapkan total anggaran Rp 29 miliar lebih," pungkasnya. (dwi/rid)

Edisi : Rabu, 13, Feb, 2019

Hal. : 9



Pegawai Kontrak Belum Digaji

Pejabat dan PNS Malah Diusulkan Kenaikan Tunjangan

TABANAN - Di saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan sibuk membahas Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk para pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun nasib pegawai kontrak yang upahnya di bawah UMR justeru telantar. Bahkan banyak tenaga kontrak yang hingga kemarin belum menerima upah kerja bulan Januari. "Jangankan naik gaji, bulan Februari ini kami belum terima upah kerja untuk bulan Januari,"

terang salah satu pegawai kontrak yang tidak mau ditulis namanya, kemarin.

Dia menyebutkan, tenaga kontrak di beberapa OPD sampai minggu kedua bulan Februari belum menerima gaji bulan Januari. Menurut sumber itu, banyak tenaga kontrak yang belum terima gaji. Jumlahnya mencapai ratusan. "Memang sih kami pegawai kontrak, tapi juga diperhatikan masalah gaji. Kami berharap pemkab segera mencairkan gaji, karena sudah memasuki minggu kedua bulan Februari," keluhnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Tabanan I Dewa Ayu Sri Budiarti ketika dikonfirmasi Selasa (12/2) mengaku kalau pengampiran gaji tenaga kontrak masih dalam

proses. Ada beberapa OPD yang gaji tenaga kontraknya sudah cair termasuk di Bakeuda. Sementara OPD lain masih proses. "Memang ada yang masih proses. Tergantung OPD yang cepat melakukan pengampiran segera diproses dan segera cair," jawabnya enteng.

Sri Budiarti menghimbau OPD segera mengajukan pengampiran gaji tenaga kontrak. Sehingga dapat segera diproses dan segera cair. Diakui Sri Budiarti, untuk TAPD saat ini memang masih membahas TPP untuk pejabat dan staf yang berstatus PNS. Bahkan sempat terjadi rapat di depan membahas hal tersebut. Sayangnya rapat tersebut dilakukan tertutup sehingga tidak diketahui hasilnya.

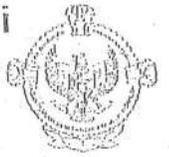
Dari informasi awal, sekda akan me-

nerima TPP sebesar Rp 45 juta per bulan. Pejabat eselon IIB setingkat kadis dan badan termasuk asisten akan menerima TPP bervariasi antara Rp 24, 27 dan 30 juta per bulan. Pejabat eselon III A seperti camat dan kabag informasinya akan menerima Rp 15 juta. Namun pejabat eselon III A lainnya untuk sekdis infonya akan mendapat Rp 11,4 juta. Pejabat eselon IIIB setingkat kabid akan menerima Rp 8 juta, eselon IV A setingkat kasi atau kasubag akan menerima Rp 5 juta dan staf yang tidak menjabat rata-rata menerima Rp 2 juta.

"Dalam draf yang disusun, jumlah TPP yang diterima pejabat berbeda-beda. Tergantung kinerja dan pekerjaan," pungkas Sri Budiarti. (uli/dit)

Edisi : Rabu, 13, Feb, 2019

Hal. : 1



Gubernur Akui PHR Masih Bocor

Siapkan Pergub Atur Integrasi Data, KPK Dorong Online

DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyebut selama ini masih terjadi kebocoran Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Agar kebocoran tidak terus terjadi, Koster mengaku sudah mengeluarkan Pergub Nomor 2/2019 tentang Integrasi Sistem dan Data PHR Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali. "Pastilah terjadi kebocoran (PHR). Kan ada (wajib pajak) dulu double buku laporannya, ada triple (tiga buku) malah," ujar Koster kepada awak media usai rapat tertutup bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kantor Gubernur Bali, kemarin (12/2).

Dengan adanya Pergub Nomor 2/2019, Koster berharap data wajib pajak (WP) bisa akurat, sehingga bisa meminimalkan kebocoran. Pergub tersebut akan segera disosialisasikan kepada



LAPORAN GANDA: Gubernur Bali, Wayan Koster saat menyampaikan keterangan pers usai rapat tertutup bareng KPK di kantor gubernuran, kemarin.

WP. Lebih lanjut dijelaskan, pergub tersebut dikeluarkan menindaklanjuti arahan KPK sejak November lalu untuk membuat sistem yang mengintegrasikan PHR. Ini karena PHR merupakan kewenangan kabupaten/kota. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari PHR diyakini menjadi lebih optimal.

Sebab, database wajib pajak akan menjadi lebih akurat se-

hingga tertib administrasi juga akan berjalan dengan baik. Termasuk potensi dan realisasi pendapatan pasti akan terjadi perbaikan dari sebelumnya. Sejahter ini, pihaknya memang belum menghitung potensi PHR di seluruh Bali.

Namun, Pemprov hanya sebatas memfasilitasi dan tidak memungut apa-apa dari integrasi tersebut. Selain PHR, juga

akan dikembangkan pada sektor lainnya. Untuk itu, pihaknya akan bekerjasama dengan BPD. "Sistemnya elektronik, nanti kami akan buat aplikasi," imbuh gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu.

Sementara itu, Koordinator Wilayah VI Korsup Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan, KPK memiliki peran untuk mencegah terjadinya kebocoran dengan mengarahkan pemberlakuan sistem secara online.

Menurut dia, pengintegrasian PHR di Bali merupakan langkah maju, sebab di tempat lain pihaknya masih mendorong kabupaten/kota untuk mengoptimalkan PHR-nya. Pasalnya, wajib pajak yang tidak melaporkan sama dengan mengemplang pajak.

Ditegaskan Suwandha, integrasi PHR kuncinya adalah kekompatan kabupaten/kota dengan provinsi, dan BPD. "Kalau tidak kompak tidak akan jalan. Kompak itu dalam artian komitmen tidak hanya sama-sama bekerja,

tapi bekerja sama," tegasnya.

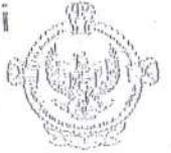
Karena itu diharapkan pemerintah kabupaten/kota segera membuat aturan lanjutan dari pergub yakni berupa perwali/perbup. Selain itu, pihaknya mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada wajib pajak yang selama ini sudah taat dan memiliki sistem. Terlebih, wajib pajak yang tercatat diperkirakan hanya berjumlah sepertiga dari total populasi wajib pajak yang seharusnya bisa dioptimalkan.

Berarti masih ada sekitar dua pertiga dari populasi

wajib pajak tersebut akan didata terlebih dulu. Sebagai contoh, apakah sudah memiliki izin atau belum. "Mereka (WP) mungkin membayar pajak, tapi kami belum masukkan sistem, jadi mereka hanya menghitung sendiri, melaporkan sendiri, membayar sendiri. Kami tidak pernah tahu, tidak punya alat kontrol untuk itu," jelasnya. Pemerintah juga harus menyiapkan solusi untuk mereka. Mungkin saja wajib pajak tersebut tidak menggunakan sistem karena tidak memiliki biaya atau SDM untuk melakukan itu. (san/rid)

Edisi : Rabu, 13, Feb, 2019

Hal. : 7



BIROKRASI

Ditanya Mutasi, Pejabat Badung Saling Lempar

MANGUPURA - Secara diam-diam Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan mutasi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN). Rabu (13/2) hari ini para ASN tersebut telah menerima surat acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Sayangnya, dari Sekretaris Daerah (Sekda) Badung maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung pun berkelit dan saling lempar.

Informasi yang dihimpun koran ini, pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut akan dilakukan terhadap 184 pegawai, yakni pejabat administrator sebanyak 40, pejabat pengawas sebanyak 66, dan pejabat fungsional tertentu sebanyak 78 orang. Mutasi ini dilakukan untuk jabatan Eselon III, IV dan Fungsional Tertentu.

Sayangnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung, I Gede Wijaya, enggan memberikan komentar perihal mutasi jabatan tersebut. Malah ia melempar untuk mengkonfirmasi ke Sekda Badung. "Begini pak Sekda yang berhak memberikan pernyataan, biar tiang ten ngelangkungi (saya tidak mendahului), biar tidak salah," jelasnya dikonfirmasi, Selasa (12/2).

Mengenai berapa pegawai yang akan dimutasi hari ini, ia tetap bungkam dan tidak memberikan jawaban. "Ya, Pak Sekda nanti beliau yang akan menjelaskan (jumlah pegawai yang dimutasi, Red) supaya saya tidak salah," kelitnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawa juga sama. Ia enggan menjelaskan perihal mutasi tersebut. Bahkan menyuruh untuk mengonfirmasi ke Bupati Badung. "Coba berkoordinasi dengan pak bupati saja ya. Jumlah nggak tahu," pungkasnya. (dwi/yor)

Edisi : Rabu, 13, Feb, 2019

Hal. : 1



HUMAS PEMKAB KLUNGKUNG FOR RADAR BALI

PATUHI ATURAN! Bupati Suwirta (dua dari kanan) menerima Tim BPK RI Bali, di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung.

Bupati Terima Tim BPK Bali

SEMARAPURA - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung I Made Seger menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali, di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Senin (11/2).

Bupati Suwirta menyampaikan, agar seluruh perangkat daerah maupun perangkat desa bisa bekerja dengan maksimal sesuai aturan yang berlaku. "Perangkat daerah maupun perangkat desa agar bekerja dengan maksimal dan ikuti aturan yang sudah berlaku," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Suwirta menambahkan, agar ke depannya apapun prestasi yang didapat Pemkab Klungkung bisa dipertahankan. Bahkan, ditingkatkan lagi. "Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, Red) agar bisa dipertahankan. Bahkan, ditingkatkan di tahun mendatang," pintanya.

Selain itu, Bupati Suwirta berharap, seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), agar bisa menyampaikan atau memberikan data yang diperlukan, sebagai pemeriksaan BPK.

Kepala Inspektorat Klungkung I Made Seger menyampaikan, tujuan kegiatan ini: pemeriksaan terkait jenis kinerja aspek ekonomi, efisiensi, dan pemeriksaan aspek efektivitas atas pengelolaan keuangan negara. Pada pemeriksaan ini, juga biasanya dimaksudkan untuk menguji kepatuhan entitas yang diperiksa (*auditee*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, tentunya keandalan sistem pengendalian internal entitas tersebut. "Pemeriksaan BPK ini dilaksanakan selama satu bulan sampai 15 Maret 2019 mendatang," ujarnya. (adv/ayu/djo)

Edisi : Rabu, 13 - Feb - 2019

Hal. : 3



Ada Anggota DPRD Badung Terlibat

Nyanyian Terdakwa Korupsi Hibah Bibit Sapi

DENPASAR - I Made Suweca, terdakwa korupsi dana hibah pengadaan bibit sapi Kelompok Tani Sari Amerta, Desa Carangsari, Petang, Badung, mulai berani "bernyanyi". Suweca mencokot salah satu anggota DPRD Badung dalam kasus yang membelitnya. "Saya difasilitasi salah seorang anggota DPRD Badung. Saya bertemu anggota dewan itu di Puspem Badung," ungkap Suweca diwawancarai usai sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar yang dipimpin Angeliky Handayani Day kemarin petang (12/2).

Siapakah anggota dewan itu? Suweca memilih merahasiakannya. Namun, suatu saat nanti jika sudah saatnya akan diungkap. Ditambahkan Suweca, anggota dewan tersebut yang

menawari dirinya mengajukan proposal dana hibah. Bahkan, anggota dewan tersebut juga menyatakan siap membantu.

Suweca yang tidak lancar baca dan tulis pun menuruti saran anggota dewan yang dikenalnya. Bahkan, Suweca mengaku tak paham dengan proposal yang dia ajukan ke Pemkab Badung. Berkat bantuan anggota dewan tersebut juga dana hibah yang diajukan bisa cair. "Saya hanya ngalih (mencari) tekanan (tanda tangan) saja. Ada tukang ketik yang membuatkan proposal," urai pria 40 tahun itu.

Yang menarik, Suweca bisa masuk ke dalam penjara karena adanya permainan politik di desanya. Namun, lagi-lagi Suweca tak mau membeberkan siapa yang bermain. "Saya merasa dikorbankan. Ada teman sendiri (yang bermain), ini persaingan politik," cetus pria yang memiliki tato burung wallet di tangan kanannya itu.

Saya difasilitasi salah seorang anggota DPRD Badung. Saya bertemu anggota dewan itu di Puspem Badung."

I MADE SUWECA
Terdakwa Korupsi Hibah Sapi

Suweca sendiri menyebut dirinya tidak bersalah. Dana hibah Rp 200 juta dari Pemkab Badung sudah digunakan sebagaimana mestinya. Selain digunakan untuk perbaikan kandang juga digunakan membeli sepuluh ekor sapi. Nah, untuk pembelian sapi sendiri Suweca mengaku bingung karena beberapa kali disuruh menukar karena dibatalkan karena tidak sesuai standar. "Saya semua diadili," pungkasnya. Sesuai dakwaan JPU dari Kejaksaan Badung, Luh Heny F Rahayu dan Windari Suli, dalam dak-

waan primer, Suweca diduga melakukan perbuatan pidana sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor. Yakni pada Maret 2018, diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Sedangkan dalam dakwaan subsidernya, terdakwa diduga melakukan perbuatan pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 pada Undang-undang yang sama berikut ketentuan perubahannya.

Sesuai surat dakwaan, dugaan korupsi itu terjadi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok ternak yang dipimpin terdakwa pada tahun anggaran 2018. Perkara ini berawal dari permohonan bantuan hibah yang diajukan terdakwa kepada Bupati Badingung. "Proposal tersebut juga disertai dengan berita acara rapat tertanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani 13 orang. Belakangan diketa-

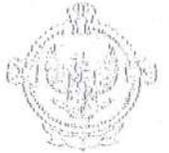
Dugaan korupsi baru muncul setelah ada evaluasi lapangan yang dilakukan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Badung pada 7 Agustus 2018. Hasil evaluasi mendapatkan kondisi sapi-sapi yang dimiliki kelompok ternak pimpinan terdakwa tidak sesuai dengan yang dilaporkan. (san/yor)

hui bahwa berita acara yang tercantum dalam proposal itu fiktif. Karena kesepuluh orang yang tercantum dalam berita acara itu mengaku tidak pernah menjadi anggota. Namun kelompok ini mendapat bantuan Rp200 juta.

Setelah dana cair, terdakwa melakukan pembelian bibit sapi. Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban yang intinya menegaskan bahwa dana hibah sudah dipergunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran dan sejenisnya.

Edisi : Rabu, 13, Feb, 2019

Hal. : 4



RTH GOR Kebo Iwa Dianggarkan Rp 6 M



• NUSABALI/NOVI ANTARI

Wakil Bupati Gianyar AA Gde Mayun meletakkan batu pertama pembangunan Landmark Ruang Terbuka Hijau di GOR Kebo Iwa, Gianyar, Selasa (12/2).

GIANYAR, NusaBali

Proyek pembangunan Landmark Ruang Terbuka Hijau (RTH) BPJS Ketenagakerjaan di kawasan GOR Kebo Iwa, Gianyar dianggarkan sekitar Rp 6 miliar. Anggaran ini bersumber dari dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami irit biaya operasional, sisihkan untuk dana TJSL untuk wujudkan sebuah tempat ikonik," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto usai acara peletakan batu

pertama, Selasa (12/2). RTH ini kedepan, kata dia, diproyeksikan sebagai tempat olahraga, rekreasi, pendidikan, dan interaksi sosial masyarakat Gianyar. Mulai dari anak-anak, remaja, pekerja, hingga lansia. "Sebagai tempat keseimbangan hidup. Terutama bagi pekerja, biar seimbang antara pekerjaan, rekreasi dan olahraga," ujarnya. Dikatakan, RTH Kebo Iwa ini menjadi proyek kedua setelah proyek yang sama di pesisir Pantai Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

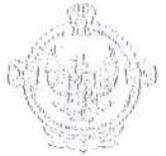
Wakil Bupati Gianyar AA Gde Mayun didampingi Sekda Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya, mengapresiasi sumbangsih dari BPJS Ketenagakerjaan dalam menata wilayah di Gianyar. Dikatakan, kebutuhan RTH di Kabupaten Gianyar telah dipenuhi sebesar 40 persen dari APBD. Sedangkan 60 persen diharapkan peran serta pihak swasta melalui CSR. Wabup AA Gde Mayun memprediksi antusias masyarakat untuk berkreasi dan olahraga di kawasan GOR Kebo Iwa akan semakin meningkat. "Saya orang Gianyar, dulu semasa kecil sering bermain di sini. Kedepan saya yakin pasti akan semakin ramai," ungkapnya.

Kata dia, akses warga memanfaatkan kawasan GOR untuk berolahraga selama proyek, tidak ada kendala. "Kalau ada warga yang jogging tidak masalah, buruh proyek kan kerja hanya delapan jam sampai jam empat sore. Setelah itu masyarakat bisa jalan-jalan. Ini lingkungannya kan luas juga disini," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Pusat Guntur Wicaksono mengatakan, RTH ini nantinya bersifat multi fungsi, selain sebagai sarana olah raga, taman bermain, tempat rekreasi juga sebagai tempat edukasi bagi masyarakat. RTH ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mendapatkan informasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan. @nvi

Edisi : Rabu, 13, Feb, 2019

Hal : 6



Terkait Keterlambatan RTH Bung Karno

DPRD Segera Panggil Eksekutif

Patung Bung Karno yang mestinya dipasang pada akhir 2018, ternyata hingga kini belum rampung dikerjakan.

SINGARAJA, NusaBali

Keterlambatan pembangunan RTH Bung Karno tahap III, membuat jajaran DPRD Buleleng, gerah. Komisi II DPRD segera meminta penjelasan eksekutif sekaligus mengevaluasi prosedur pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan tersebut.

Rencananya, Komisi II mengundang Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta), Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Buleleng, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng. Selain itu, Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Buleleng, Senin (18/1) pekan depan.

"Kami ingin mendapat penjelasan, kendalanya itu sebenarnya dimana. Sehingga untuk tahun-tahun mendatang, kami bisa lakukan langkah antisipasi. Sebab tahun 2018 itu, banyak sekali



• NUSABALI/LILIK

KONDISI patung Bung Karno di RTH (ruang terbuka hijau) Buleleng. Warga masih menunggu pemasangan patung Bapak Proklamator tersebut.

proyek yang molor, malah sampai putus kontrak dan black list," kata Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, dikonfirmasi, Selasa (12/2)

Politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini mengaku prihatin dengan molornya pembangunan RTH Bung Karno. Mengingat proyek itu sangat dinantikan masyarakat. Patung Bung Karno yang mestinya dipasang

pada akhir 2018, ternyata hingga kini belum rampung dikerjakan. Mangku Mertayasa menduga kontraktor yang mengerjakan proyek mengalami masalah finansial. "Bisa jadi hanya mengandalkan realisasi uang muka. Kalau memang benar itu yang terjadi, tentu sangat kami sayangkan," tegasnya.

Nantinya dalam rapat dengan pendapat itu, pemerintah akan melakukan

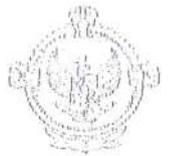
langkah evaluasi secara menyeluruh. Dewan juga berharap prosedur lelang bisa diperketat. Sehingga peserta tender hanya diikuti oleh kontraktor yang memiliki modal kerja.

Sebelumnya, Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng, secara resmi menghentikan pekerjaan proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bung Karno tahap III. Pihak rekanan dalam hal ini PT Chandara Dwipa, juga sudah masuk dalam daftar black list proyek pembangunan pemerintah.

"Ya sesuai peraturan saja, karena sudah tidak mampu menyelesaikan tepat waktu selama masa kontrak dan juga sudah kami berikan waktu perpanjangan cukup lama, tetapi tidak selesai juga, terpaksa kami black list," kata Kadis Perkimta Surrattini. Jelas dias, perusahaannya yang tak mampu menyelesaikan pekerjaan sudah memulangkan puluhan pekerjanya yang selama ini menggarap proyek RTH Bung Karno. Terkait proses pembangunan yang tak dapat diselesaikan menurutnya cukup terpengaruh dari cuaca yang belakangan turun hujan. Namun dirinya enggan menjelaskan lebih rinci kendala lainnya yang dihadapi dalam proses pengerjaan proyek. **k19**

Edisi : Rabu, 13, Feb, 2019

Hal : 4



BPK Periksa Pengelolaan Keuangan di Klungkung



• IST
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima Tim BPK, di Kantor Bupati Klungkung, Senin (11/2).

SEMARAPURA, NusaBali
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung I Made Seger, menerima Tim BPK RI Perwakilan Bali, di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Senin (11/2). Kedatangan BPK untuk memeriksa keuangan negara di Klungkung, sampai 15 Maret 2019.

Inspektur Daerah Klungkung I Made Seger mengatakan, tujuan kegiatan ini yakni pemeriksaan terkait jenis kinerja, aspek eko-

nomi, efisiensi, dan pemeriksaan aspek efektivitas atas pengelolaan keuangan negara. Pada pemeriksaan ini juga dimaksudkan untuk menguji kepatuhan entitas yang diperiksa (audit) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Tentunya keandalan sistem pengendalian internal entitas tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Suwirta mengatakan, perangkat daerah maupun perangkat desa agar bekerja dengan maks-

mal dan ikuti aturan yang sudah berlaku. Ke depannya apapun prestasi yang sudah didapat Pemkab Klungkung bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. "Predikat (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP agar bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang," harapnya. Selain itu, Bupati Suwirta berharap kepada seluruh jajaran OPD agar bisa menyampaikan atau memberikan data yang di perlukan sebagai pemeriksaan BPK. **wan**

3 JATT 11-5-21 NUSA BALI



Anggaran Kurang, Pembebasan Lahan "Shortcut" Terhambat

Tabanan (Bali Post) -

Tahapan pembangunan *shortcut* jembatan Tukad Yeh Otan yang menghubungkan Desa Bajera Kecamatan Selemadeg dan Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat, berlanjut. Satker Balai Jalan Wilayah VIII tengah melakukan pembayaran ganti rugi atas lahan terdampak pembangunan, sesuai nilai *appraisal*. Hanya, proses pembayaran yang dimulai Desember 2018 tersebut baru bisa mencakup sebagian lahan. Hal ini akibat terjadinya kekurangan anggaran.

"Informasi yang kami tahu, di luar dugaan, harga *appraisal* tinggi sehingga terjadi kekurangan anggaran. Tetapi saya dengar tahun ini sudah disiapkan anggaran lagi untuk sisa pembayaran karena itu semua anggaran dari DIPA pusat," terang Kepala Bagian Pembangunan Setda Tabanan Anak Agung Ngurah Agung Satria Tenaya, Rabu (13/2) kemarin.

Terkait pembayaran ganti rugi, kata mantan Kabag Tapem Setda Tabanan ini, memang menjadi ranah Satker Balai Jalan Wilayah VIII. Pemkab Tabanan hanya bertugas melakukan penetapan lokasi yang di dalamnya juga berisi tahapan pembebasan lahan terdampak.

Dijelaskannya, untuk di

wilayah Desa Bajera, sudah semua ganti rugi lahan dibayarkan oleh Satker dengan jumlah 6 bidang tanah dari 4 pemilik. Sementara di Desa Antosari yang belum terbayar ada 10 bidang tanah dari 8 pemilik lahan. "Dalam waktu dekat, sepertinya akan ada lagi kelanjutan untuk pembayaran sisa lahan di Desa Antosari," ucapnya sembari menambahkan, kemungkinan tahun ini pembangunan *shortcut* bisa dimulai.

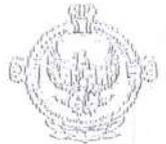
Untuk diketahui, pembangunan *shortcut* keempat ini merupakan proyek pemerintah pusat yang sepenuhnya akan dibiayai oleh APBN. Keberadaan jalur pintas di Yeh Otan ini diyakini dapat memperlan-

car akses transportasi dari Denpasar-Gilimanuk dan sebaliknya. Pasalnya di jalur tersebut saat ini merupakan jalur tengkorak atau kerap terjadi kecelakaan lalu lintas karena tikungan tajam dan jalan menurun. "Dengan adanya *shortcut* ini, semoga arus lalu lintas semakin lancar dan meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Nantinya, jembatan ini akan memiliki panjang 600 meter dengan lebar sekitar 16 meter. Dari data yang dihimpun, di dua desa tersebut ada sejumlah lahan yang terdampak pembangunan di antaranya lahan perumahan, toko, dan kebun. Pemilik lahan sebanyak dua belas orang. (kmb28)

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal : 7



Harga Lahan di Luar Dugaan

● 10 Bidang Tanah Shortcut Belum Dibayarkan

TABANAN, TRIBUN BALI - Tahap pembebasan lahan yang dilakukan oleh Satker BPJN Wilayah VIII untuk rencana pembangunan shortcut ke IV yang akan menghubungkan antara Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg dengan Desa Antosari, Selemadeg Barat, belum juga tuntas.

Pembayaran ganti rugi lahan dari Desember 2018 ini baru dilakukan sebagian. Penyebabnya ternyata harga appraisal (nilai aset) yang tinggi. Ini yang menimbulkan permasalahan pada anggaran.

"Informasi yang kami peroleh harga lahan di sana (lokasi) di luar dugaan. Ternyata nilai appraisal tinggi sehingga kekurangan anggaran," ujar Kabag Pembangunan Anak Agung Ngurah Agung Satria Tenaya, Rabu (13/2).

Satria Tenaya mengungkapkan, yang sudah dibayarkan hanyalah pemilik lahan yang ada di Desa Bajera berjumlah empat orang dengan enam bidang tanah. Sedangkan yang belum dibayar adalah pemilik lahan di Desa Antosari berjumlah delapan pemilik terdiri dari 10 bidang tanah.

"Namun untuk tahun ini, sudah dianggarkan kembali untuk sisanya yang besumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat," imbuhnya.

Disinggung mengenai harga tanah di ka-

wasan tersebut, ia mengatakan bukan ranahnya. Sebab untuk pembayaran lahan di sana merupakan ranah dari Satuan Kerja (Satker) Balai Jalan Wilayah VIII.

Terlebih lagi, ranah dari Pemkab Tabanan dalam pembangunan shortcut ini adalah melakukan tugas untuk penetapan lokasi, dimana didalamnya juga berisi tahapan pembebasan lahan yang terdampak pembangunan shortcut ke IV tersebut.

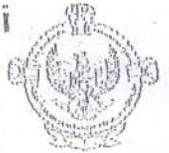
"Dalam waktu dekat sepertinya akan ada lagi kelanjutan untuk pembayaran sisa lahan di desa Antosari. Dan setelah tahapan selesai pembangunan akan langsung dilakukan. Kemungkinan dilakukan di tahun 2019 ini," ucapnya.

Sebelumnya, pembangunan jembatan shortcut ke IV memasuki babak baru setelah sempat diwacanakan sejak 2016 lalu. Tahun ini, akan dimulai dengan proses pembebasan lahan. Jembatan ini akan memiliki panjang 600 meter dengan lebar sekitar 16 meter ini dan direncanakan mulai berjalan tahun 2019 mendatang.

Untuk lahan yang terdampak akibat pembangunan shortcut sebanyak 12 orang di dua desa yakni Desa Bajera dan Desa Antosari. Lahan itu terdiri dari perkebunan, toko, merajan dan lahan kosong. (mpa)

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal : 5



Ketika Eks Perbekel Desa Baha, Mengwi, Terbukti Korupsi Sempat Mau Kembalikan Uang, Tetap Dibui 4,5 Tahun

Seperti narkoba, kasus korupsi seperti tidak ada habisnya. I Putu Sentana, mantan perbekel Desa Baha, Mengwi, Badung, akhirnya diganjar hukuman 4,5 tahun penjara. Di usianya yang sudah 57 tahun, dia bakal menghabiskan masa tuanya di dalam penjara.

MAULANA SANDIJAYA, Denpasar

SEMULA pria itu tampak tenang menghadapi vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. Penampilan perbekel dua periode, itu terlihat necis dan perlente dengan rambut disisir kelimlis.

Namun, ketenangan pria 57 tahun itu tak

bertahan lama. Wajahnya berubah menjadi pucat ketika majelis hakim menjatuhkan putusan. "Mengadili, menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan (4,5 tahun) kepada terdakwa I Putu Sentana," tegas ketua majelis hakim Bambang Ekaputra saat membacakan amar putusannya kemarin (13/2).

Hakim menyatakan bahwa Sentana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara. Selain pidana badan, hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Tidak cukup itu saja, hakim juga mewajibkan Sentana membayar uang pengganti yang dia korupsi sebesar Rp 1 miliar ■

► Baca **Sempat Mau...** Hal 11

Enam Bulan Lebih Ringan dari Tuntutan

■ SEMPAT MAU...

Sambungan dari hal 1

Tepatnya Rp 1.006.633.856,95. Uang tersebut merupakan uang APBDes Desa Baha 2016 - 2017. "Bila uang pengganti tak dibayar hingga putusan berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus menjalani hukuman selama 1,5 tahun," imbuh hakim.

Putusan membayar ganti rugi tampaknya sulit bagi Sentana untuk menunaikannya. Sebab, sebelum masalah ini dibawa ke meja hijau, Sentana sudah diberi kesempatan mengembalikan uang yang dikorupsi. Namun, Sentana tak sanggup mengembalikannya. Artinya, Sentana bakal menjalani hu-

kuman 6 tahun penjara.

Hakim menilai perbuatan Sentana memenuhi unsur pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dakwaan primer.

"Hal yang memberatkan terdakwa belum membayar uang ganti rugi negara, terdakwa sebagai perbekel juga seharusnya menjadi contoh masyarakat," beber hakim yang juga Ketua PN Denpasar. Sementara yang meringankan, terdakwa bersikap sopan serta menderita sakit jantung, dan menjadi tulang punggung keluarga.

Putusan hakim sendiri enam

bulan lebih ringan dari tuntutan Kabupaten Badung.

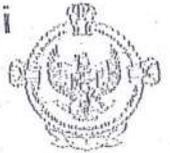
Pada poin ganti rugi inilah sebelumnya menuntut lima terdakwa diberatkan. Karena tahun penjara. Atas putusan proses ganti rugi nyatanya hakim, terdakwa yang didid- tidak pernah dilakukan terdampingi penasihat hukumnya I wa. Kendati demikian, sampai Gusti Putu Suwena menyatakan batas waktu yang ditentukan, pikir-pikir. "Kami minta waktu terdakwa rupanya tidak kunjung seminggu untuk pikir-pikir, Yang melakukan upaya ganti rugi. Di Mulia," kata terdakwa. Reaksi saat yang sama proses hukum-senada juga disampaikan JPU ya sendiri terus berjalan.

Putu Gede Suriawan.

Selama persidangan tidak Untuk diketahui, sejatinya ditemukan alasan pemaaf sebelum perkara ini sampai terhadap terdakwa. Perbuatan pada proses hukum, Sentana terdakwa bertentangan dengan sendiri sebetulnya sempat gan usaha pemerintah yang menyatakan permohonan sedang gencar memberantas maaf. Juga bersedia melakukan korupsi. Sementara pertim-ganti rugi atas dana APBDes bangunan meringankan, terdak-wa yang diselewengkan. Itu terjadi wa mengakui perbuatannya, saat muncul hasil audit inter-belum pernah dihukum, dan nal yang dilakukan Inspektorat berterus terang. (/pit)

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal. : 1



Polisi Kawal Pembagian BPNT

Agar Tepat
Sasaran dan
Tidak Terjadi
Penyimpangan

NEGARA- Pembagian bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) se-Jembrana, akan dikawal Polres Jembrana agar pembagian beras tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan saat pembagian.

Kabagops Polres Jembrana Kopol Mahfud Didik Wiratmoko mengatakan, pengawalan pembagian beras pada warga yang memiliki KKS di masing-masing desa dan kelurahan se-Jembrana, minimal melibatkan Babbinkamtibmas pada saat penyaluran. "Kalau penyaluran dalam bentuk barang ditambah lagi anggota lima orang anggota," jelasnya, kemarin (13/2).

Didik memastikan, penyaluran BPNT pada KPM se-Jembrana hingga saat ini dipastikan tidak ada kendala berarti. Penyaluran tidak ada penyimpangan, tepat sasaran kepada yang berhak menerima.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Ketut Komala Dewi mengatakan, Jumlah KPM di Jembrana sebanyak 10.055 kepala keluarga


"Kalau penyaluran dalam bentuk barang ditambah lagi anggota lima orang."

**Kopol Mahfud Didik
Wiratmoko**
Kabagops Polres Jembrana

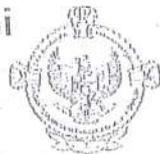
(KK). Pemegang kartu yang dikeluarkan kementerian sosial, yang berisi saldo Rp 110 ribu, hanya bisa menukarkan kartu dengan beras. Pembagian beras di masing-masing kelurahan dan desa tempat penerima tinggal. Beras yang dibagikan dari bulog yang sudah di tunjuk oleh pemerintah di masing-masing desa.

Menurut Gorim, program ini sebelumnya bernama beras miskin (raskin), kemudian bernama beras sejahtera. Saat ini bernama bantuan pangan non tunai (BPNT). Pemerintah tidak lagi mengeluarkan uang tunai, karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan uang tidak digunakan untuk semestinya.

Proses penerimaan saat ini, KPM yang sudah memegang kartu yang sudah berisi saldo uang, ditukar dengan beras. Programnya ini bantuan non tunai, berbeda dengan program dulu masyarakat menerima bantuan dalam bentuk beras. **(bas/han)**

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal. : 5



Lima Proyek Gagal Digarap

Dinas PUPR Blacklist Kontraktor

MANGUPURA – Sebanyak lima proyek fisik di Kabupaten Badung anggaran tahun 2018 gagal dikerjakan. Proyek yang dikerjakan dua kontraktor ini pun langsung ditindak tegas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Selain diputus kontrak, dua kontraktor tersebut juga di blacklist.

Data yang dihimpun dari Dinas PUPR Badung, kelima proyek yang diganjar putus kontrak diantaranya empat digarap PT Metra Giri Karya dan satu proyek lagi dikerjakan oleh

CV Kresna Dwipa. Secara rinci empat proyek bermasalah yang digarap PT Metra Giri Karya, adalah pembangunan RKB dan Renovasi Halaman SD Negeri 3 Legian senilai Rp 2.835.050.344. Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian senilai Rp 2.191.961.000, pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Can sebesar Rp 2.407.799.900 dan pembangunan Wantilan Melasti di Club Med dengan nilai sebesar Rp 1.387.894.000.

Kemudian proyek yang dikerjakan CV Kresna Dwipa adalah pembangunan gedung dan penataan halaman Puskesmas Pembantu Punggul dengan nilai sebesar Rp 1.747.119.563. "Iya, ada

“
Yang lain (proyek molor lainnya) sudah selesai. Cuma lima ini saja bermasalah.”

**IDA BAGUS SURYA
SUAMBA**
Kadis PUPR Badung

lima kegiatan tahun 2018 kita putus kontrak. Kontraktor tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Jadi kita ambil alih dan kita putus kontrak,” terang Kadis PUPR Badung, Ida Bagus Surya Suamba yang dikonfirmasi, Rabu (13/2).

Kontraktor yang menggarap lima proyek itu sebelumnya

sudah dikenakan penalti sebelum akhirnya diambil alih dan dikenakan sanksi putus kontrak. Selain itu, semua proyek yang sempat molor sudah bisa diselesaikan dengan baik. “Yang lain (proyek molor lainnya) sudah selesai. Cuma lima ini saja bermasalah,” birokrat asal Tabanan ini.

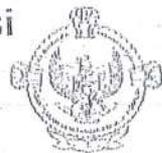
Pihaknya juga mengaku sudah berkali-kali melayangkan teguran kepada pelaksanaan atau kontraktor. Akan tetapi, tidak digubris. Justru progress proyek tambah molor. Padahal, Dinas PUPR sudah memberikan sanksi penalti kepada masing-masing kontraktor. Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan putus kontrak

dan juga memproses rencana blacklist terhadap dua kontraktor yang menggarap lima proyek ini. “Pasti nanti kita blacklist, cuma ada prosedurnya. Karena kalau tidak di black list nanti kita yang kena masalah, kalau jadi temuan,” terang mantan Kabid Jalan dan Jembatan ini.

Soal kelanjutan lima proyek tersebut, Surya mengaku sudah diambil alih. Pihaknya sudah menunjuk sejumlah kontraktor untuk melanjutkan pengerjaannya. “Untuk kelanjutannya, kita sudah menunjuk kontraktor baru untuk melanjutkan. Nanti, berapa sisa pekerjaan yang belum, itu nanti kita bayar,” pungkasnya. (dwi/rid)

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal. : 9



Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas

Pada Proyek Shortcut IV Bajera - Antosari

TABANAN - Proyek pembangunan *short cut* IV Jalan Nasional Denpasar - Gilimanuk di Sungai Yeh Otan yang menghubungkan Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg dengan Desa Antosari, Selemadeg Barat yang sudah tuntas pembebasan lahan, belum ada titik terang kapan dimulai proyeknya.

Meski tahap pembebasan lahan sudah tuntas sejak 2018 lalu, namun kini terkendala soal

pembayaran ganti rugi lahan milik warga yang terkena pembangunan *short cut*. Hingga kini pembayaran ganti rugi tanah warga baru dibayar setengah.

Kabag Pembangunan A. A Ngurah Tenaya didampingi Kabag Tapem (Tata Pemerintahan) Setda Tabanan, I Wayan Yelada mengatakan proyek pembangunan *short cut* IV Jalan Nasional Denpasar - Gilimanuk sepanjang 600 meter terus berproses. Namun terkait dengan pembayaran ganti rugi hal itu wewenang Satker BPJN Wilayah VIII Provinsi Bali. Dia pun men-

gaku untuk pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan baru dibayarkan setengah pada Desember 2018 lalu.

"Di Desa Bajera berjumlah 4 orang dengan 6 bidang tanah yang sudah dibayarkan. Sedangkan yang belum dibayarkan pemilik lahan di Desa Antosari yang berjumlah 8 pemilik terdiri dari 10 bidang tanah. Kalau harga per meter lahan untuk ganti rugi hanya Satker BPJN Wilayah VIII Provinsi Bali yang mengeahui," ujar Ngurah Tenaya, Rabu (13/2).

Dia menambahkan, pembayaran ganti rugi lahan terken-

dala kekurangan anggaran. Pasalnya tidak disangka harga appraisal lahan tinggi. Itu sesuai dengan informasi yang diberikan Satker BPJN wilayah VIII Bali. Tetapi pembayaran ganti rugi akan dilanjutkan pembayarannya tahun ini.

"Terkait dengan target pembangunan *short cut* dimulai kami belum tahu jelas. Karena hal tersebut wewenangnya ada di Satker mengingat jalan yang dibangun *Short Cut* adalah jalan nasional," jelasnya.

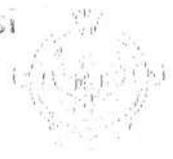
Dalam pembangunan *short cut* IV pemkab Tabanan hanya

memiliki tugas sampai penetapan SK lokasi yang sudah dilakukan Oktober 2018. Namun terkait teknis pembangunan dan lain-lain itu wewenang dari di wilayah Satker. Proyek sepanjang 600 meter dan lebar 16 meter di wilayah Kabupaten Tabanan ini menggunakan anggaran DIPA.

"Tujuan dari pembangunan *short cut* untuk dapat mempersingkat jarak, memperlancar arus lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Karena saat ini jalur tersebut memiliki tikungan tajam dan berliku," tandasnya. (uli/dit)

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal. : 2



BK Hanya Menunggu

Kasus Keterlibatan Anggota Dewan dalam Korupsi Hibah Bibit Sapi

MANGUPURA - Kasus dugaan korupsi hibah bibit sapi Kelompok Tani Sari Amerta, Desa Carangsari, Petang, Badung sudah sampai ke meja hijau. Dugaan penyelewengan hibah itu juga menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Badung. Pasalnya, pemberian bantuan hibah bibit disebut-sebut difasilitasi oleh anggota Dewan Badung.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung Nyoman Sentana mengatakan, sikap BK terkait kasus tersebut tentu menyikapi setelah ada laporan masuk ke BK. Kemudian baru disikapi, turun ke lapangan melakukan verifikasi dan penyelidikan. "Setelah itu baru kami memanggil teman-teman yang diduga

“**Saya yakin ke depan pengawasan kita lebih intens dan prioritas sebagai bahan evaluasi.”**

NYOMAN GIRI PRASTA
Bupati Badung

ada indikasi terlibat. Hanya sebatas itu saja kami bisa, kalau bukti cukup, baru kami memberikan laporan di (rapat) paripurna,” jelas Sentana dikonfirmasi, Rabu (13/2).

Namun, ia mengaku, sampai saat ini belum ada menerima laporan. Sebab, BK tidak mendahului, karena kasus ini sudah menjadi ranah hukum. "Saat ini belum ada laporan masuk ke kami," terang Sentana yang juga anggota Komisi IV DPRD Badung ini.

Lebih lanjut, ia mengingatkan kalangan anggota Dewan Badung. Karena sekarang aparat

“**Saat ini belum ada laporan masuk ke kami.”**

NYOMAN SENTANA
Ketua BK DPRD Badung

penegak hukum sudah tidak memikirkan tebang pilih lagi dalam menindak. Sehingga diimbau berhati-hati dalam memfasilitasi bantuan hibah. "Kami mengingatkan kepada teman-teman anggota DPRD semuanya untuk berhati-hati,

jangan ada bermain. Kita tidak menginginkan teman-teman jadi korban," terang politisi Partai Gerindra asal Abiansemal itu.

Tidak hanya itu, kasus ini juga mendapat sorotan dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Ia menuding, dugaan korupsi hibah bibit sapi tersebut adalah ulah oknum tertentu dan tidak menjadi masalah general pada kelompok tani lainnya serta Pemerintah Kabupaten Badung. Karena pemberian hibah untuk kelompok tani sudah

sesuai aturan yang berlaku. Bahkan sudah dilakukan sesuai *by name by address*, masuk dalam KUP/PPAS, objek subjek jelas, persyaratan jelas, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan hibah ditransfer ke rekening kelompok penerima. "Ini namanya oknum, dan kita tidak menggeneralisir berarti semua salah. Itu sudah ranah ketua sama kelompoknya, bukan di kita lagi," jelas Giri Prasta saat ditemui di Puspem Badung. (dwi/yor)

Bupati Lakukan Evaluasi

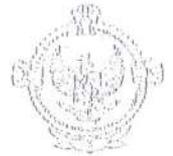
BUPATI Badung Nyoman Giri Prasta mengakui, untuk pengawasan kelompok tani juga sudah ada unit teknis dari perangkat daerah yakni Dinas Pertanian dan Pangan Badung. Para petugas telah bergerak untuk mengawasi. Kalau memang ada menyimpang tentu akan menjadi temuan dan berhadapan dengan hukum. "Kalau masalah personal itu susah. Contohnya rakyat Indonesia semua kita inginkan maju, bahagia. Tetapi yang

namanya meracik banyak kepala kan susah dan tentu kita evaluasi terus," ungkapnya.

Lebih lanjut, dari munculnya kasus kelompok tani yang sampai terjerat masalah hukum tentu ini menjadi bahan evaluasi. Sehingga nantinya tidak lagi ada terjadi kasus serupa yang menimpa kelompok tani di Badung. "Saya yakin ke depan pengawasan kita lebih intens dan prioritas sebagai bahan evaluasi," pungkasnya. (dwi/yor)

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal. : 4



Perbekel Baha Divonis 4,5 Tahun

★ Korupsi Pengelolaan APBDes Sebesar Rp 1 Miliar

Dalam perkara ini, tersangka diduga menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi sejak menjabat sebagai Perbekel Desa Baha dari tahun 2007-2013 kemudian 2013-2019.

DENPASAR, NusaBali

Perbekel Baha, Kecamatan Mengwi, Badung, I Putu Sentana, 57 dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (13/2) dalam kasus korupsi pengelolaan APBDes tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1 miliar. Selain hukuman fisik, Sentana juga dijatuhi denda Rp 200 juta subsider 1 bulan penjara dan juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp

1.006.633.856.

"Dengan ketentuan jika tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Dan jika belum mencukupi akan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun dan enam bulan," tegas majelis hakim pimpinan Bambang Eka Putra.

Dalam putusan, Sentana dinyatakan secara sengaja melakukan upaya memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atas perbuatannya, Perbekel dua periode ini dijerat pasal 2 Jo Pasal 18 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Putusan ini sendiri masih di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Gede Suriawan dkk yang sebelumnya menuntut hukuman 5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 3 bulan serta mengganti kerugian negara Rp 1 miliar lebih subsider 2,5 tahun penjara.

• Atas putusan tersebut, JPU



• NUSABALI/REZA

PERBEKEL Baha, Kecamatan Mengwi, Badung, I Putu Sentana, 57, saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (13/2).

menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama dinyatakan terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, I Gusti Putu Suwena juga menyatakan hal yang sama. "Kami pikir-pikir Yang Mulia," tegasnya.

Dalam perkara ini, tersangka diduga menggunakan anggaran

desa untuk kepentingan pribadi sejak menjabat sebagai Perbekel Desa Baha dari tahun 2007-2013 kemudian 2013-2019.

Kasus ini masuk tahap penyelidikan tahun 2017 dan dilakukan audit oleh BPKP. Hasilnya, I Putu Sentana terbukti melaku-

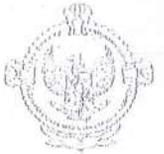
kan penyalahgunaan anggaran. Penyidik menetapkan sebagai tersangka pada 19 April lalu.

Dalam aksinya, terdakwa membuat rekening di BPD Bali atas inisiatif sendiri mengatasmakan dana Desa Baha untuk penampungan dana APBDes. Tapi, buku tabungan yang seharusnya menjadi kewenangan bendahara justru dibawa terdakwa. Tersangka beberapa kali melakukan penarikan uang dipakai untuk keperluan sehari-hari, membeli barang dan juga berobat sakit jantung. Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi tersangka tersebut dicatatkan sebagai SILPA (sisa lebih penghitungan anggaran) fiktif.

Perbuatan tersangka tidak hanya mengakibatkan kerugian negara Rp 1 miliar lebih. Beberapa kegiatan juga tidak dapat terlaksana seperti pembangunan Balai Subak Lepud, Baha. Pengadaan perlengkapan Museum Subak Lepud, pembelian mobil operasional kantor, penyuluhan hukum LPM serta penanaman pohon kamboja. rez

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal : 5



Pemkab Bangli Dituding

Ingkar Janji

Proses perjanjian sewa menyewa lahan untuk ruko sudah berlangsung sejak tahun 1994.

BANGLI, NusaBali

Pemkab Bangli dan Desa Adat Batur Kalanganyar, Kecamatan Kintamani memiliki perjanjian sewa lahan ruko di areal Pasar Singamandawa, Kintamani. Pemkab Bangli berkeajiban membayar sewa berupa

beras sebanyak 5 kwintal setiap *ngusaba kadasa*. Namun Pemkab Bangli dituding mengingkari perjanjian tersebut.

Ketua Tim Aset Legalitas Desa Adat Batur, I Ketut Sugita, mengatakan luas lahan 9,5 are yang dimanfaatkan untuk membangun ruko di Pasar Singamandawa. Kriteria aset milik Desa Adat Batur ada tiga yakni tanah laba pura, duwen desa (milik Desa Batur), dan tanah pekarangan desa (PKD). "Lahan yang sekarang dimanfaatkan untuk membangun ruko adalah tanah duwen desa adat," terang Sugita, Rabu (13/2). Proses perjanjian sewa menyewa lahan untuk ruko



• NUSABALI/EKA SRI

Ketua Tim Aset Legalitas Desa Adat Batur, I Ketut Sugita.

sudah berlangsung sejak tahun 1994. Pemkab Bangli dipimpin oleh Bupati IB Agung Ladip (almarhum).

Semasa kepemimpinan IB

Agung Ladip, proses perjanjian berjalan lancar. Dari masa pemerintahan Bupati I Nengah Arnawa hingga kepemimpinan Bupati I Made Gianyar tidak jelas pembayaran kewajiban sewa lahan ruko tersebut. Diakui, pada tahun 2016 sempat audiensi dengan Bupati Made Gianyar untuk menyikapi masalah ini, namun tidak ada kelanjutannya. "Kami sudah sempat audiensi dengan Bupati Made Gianyar," imbuhnya sembari menunjukkan *copy*-an sertifikat lahan yang dimaksud.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli, I Nengah

Sudibia, mengaku hingga saat ini belum melihat perjanjian yang dimaksud. "Kami baru menangani pasar sejak 2014 lalu, sebelumnya di Dinas Pendapatan yang kini Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD)," jelasnya. Diakui sempat ada audiensi dengan Bupati Made Gianyar dan hadir Tim Aset Desa Adat Batur untuk membahas hal tersebut. "Memang kami sempat koordinasikan hal itu. Sampai saat ini kami belum melihat perjanjian tersebut," imbuhnya. Ia menyarankan mengecek di BKPAD Bangli untuk data lengkapnya. es

Edisi : Kamis, 14 - Feb - 2019

Hal : 8



Menunggu Komitmen Pejabat Kelola PHR

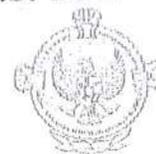
Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) ternyata diatensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini tentu hal menarik yang patut disikapi. Selama ini, PHR menjadi pelumas pengelolaan pemerintahan di Bali. Makanya ada daerah yang kaya dan miskin di Bali. Padahal jika dilihat dari kontribusinya terhadap sektor pariwisata, nyaris semua kabupaten/kota di Bali memiliki objek wisata yang memiliki daya jual. Menjadi menarik saya baca di Harian *Bali Post*, Rabu (13/2), ketika KPK meminta Provinsi Bali mengintegrasikan PHR. Apakah hal ini akan dilakukan secara mudah atau akan mendapat hambatan dari para bupati/wali kota yang selama ini telah mengelola secara otonomi PHR ini. Yang jelas, saya sebagai rakyat Bali dengan melihat beban *krama* Bali dalam menjaga budayanya, ada baiknya pengelolaan PHR memang diintegrasikan. Saya menunggu komitmen pejabat di Bali dalam hal ini.

Kita tentu harus berpikir holistik terhadap pengelolaan Bali. Terlebih kini muncul wacana pemerintahan *one island one management*. Ini adalah momentum bagus untuk membuktikan bahwa pemimpin kita di Bali tak terjebak kepentingan personal dan parsial dalam mengelola pemerintahan. Saya berharap, langkah mengintegrasikan pengelolaan PHR ini segera dikomunikasikan dan dilakukan secara terbuka. Komunikasi dengan semua pihak hendaknya dilakukan dengan rasa *ngayah* untuk Bali.

I Wayan Arsana
Gianyar, Bali

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal : 6



Korupsi APBDes

Mantan Perbekel Baha Divonis 4,5 Tahun Penjara

MANTAN Perbekel Desa Baha, Badung, I Putu Sentana (57), Rabu (13/2) kemarin divonis empat tahun enam bulan (4,5 tahun) penjara. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi APBDes secara berlanjut, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.006.633.856,95.

Majelis hakim pimpinan Bambang Ekaputra dalam amar putusannya menyatakan sependapat dengan jaksa. Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan primer, yakni melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain dihukum selama 4,5 tahun, Sentana juga dihukum membayar denda Rp 200 juta, subsider dua bulan kurungan. Masih dalam putusan hakim, juga ada hukuman tambahan yakni membayar uang pengganti sebagai akibat keru-

gian keuangan negara sebesar Rp 1.006.633.856,95. Apabila dalam waktu satu bulan setelah perkara ini mempunyai hukuman tetap terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara. Kalau harta benda tidak cukup, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun enam bulan.

Setelah mendengarkan putusan tersebut, Sentana diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan kuasa hukumnya. Namun setelah beberapa menit, Sentana tampak ragu, hingga akhirnya menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga disampaikan jaksa.

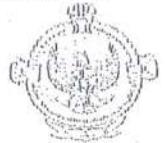
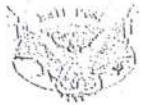
Vonis tersebut sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa. JPU Suryawan dan Kadek Wahyudi sebelumnya menuntut terdakwa dihukum selama lima tahun penjara. Di samping itu, denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan. Jaksa juga memberikan hukuman tambahan pada terdakwa yakni membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.006.633.856,95 yang apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sentana oleh jaksa diduga melakukan korupsi APBDes pada tahun anggaran 2016/2017. (kmb37)

BERKOORDINASI - I Putu Sentana saat berkoordinasi dengan kuasa hukumnya usai divonis bersalah dan dihukum 4,5 tahun penjara.

Edisi : Kamis, 14, Feb, 2019

Hal : 3



Lima Proyek Molor, Dinas PUPR "Blacklist" Dua Rekanan

Mangupura (Bali Post) -

Dua rekanan yang menggarap lima proyek fisik milik Pemkab Badung harus masuk daftar hitam (*blacklist*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung. Sanksi ini diberikan lantaran rekanan gagal menggarap proyek yang telah dianggarkan 2018 lalu.

Berdasarkan informasi Rabu (13/2) kemarin, satu rekanan yang di-*blacklist* itu menggarap proyek pembangunan RKB dan renovasi halaman SD Negeri 3 Legian senilai Rp 2.835.050.344.

pembangunan wantilan Pura Puseh Legian senilai Rp 2.191.961.000, pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani sebesar Rp 2.407.799.900 dan pembangunan wantilan Melasti

di Club Med dengan nilai Rp 1.387.894.000. Sementara satu rekanan lagi menggarap proyek pembangunan gedung dan penataan halaman Puskesmas Pembantu Punggul dengan nilai Rp 1.747.119.563.

Kepala Dinas PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba membenarkan ada dua kontraktor tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Selain kena sanksi putus kontrak, kontraktor ini juga kini dikenakan sanksi *blacklist*.

"Saat ini masih ada lima proyek tahun 2018 molor. Kontraktor yang menggarap lima proyek itu sebelumnya sudah dikenakan pinalti sebelum

akhirnya diambil alih dan dikenakan sanksi putus kontrak," ungkapnya.

Pihaknya telah berkali-kali melayangkan teguran kepada pelaksana atau kontraktor. Hanya saja, tidak mendapatkan tanggapan. Bahkan, progres proyek semakin menurun meski Dinas PUPR telah memberikan sanksi pinalti kepada masing-masing kontraktor. "Tetap saja dia tidak mampu.

Karena itu langsung putus kontrak," tegasnya.

Selain memutuskan kontrak, pihaknya juga tengah memproses *blacklist* terhadap dua kontraktor yang menggarap lima proyek ini. "Pasti nanti kita *blacklist*. Cuma ada prosesnya. Karena kalau tidak di-*blacklist*, nanti kami lagi yang kena masalah kalau jadi temuan," jelasnya.

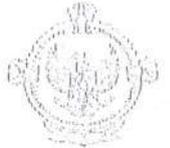
Lebih lanjut dia mengaku

telah menunjuk sejumlah kontraktor untuk melanjutkan lima proyek tersebut. Selain itu, semua proyek yang sempat molor telah diselesaikan dengan baik.

"Kami sudah menunjuk kontraktor baru untuk melanjutkan proyek. Nanti berapa sisa pekerjaan yang belum, itu nanti kita bayar. Cuma lima ini saja bermasalah," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Kamis, 14 - Feb - 2019

Hal : 3



Bantuan Bedah Rumah dari Pemkab Badung Bakal Drealisasikan Tahun Ini

Rp 100 Miliar untuk 6 Kabupaten

Pemkab Badung menyiapkan Rp 100 miliar untuk membantu bedah rumah sebanyak 2.000 rumah di enam kabupaten di Bali.

MANGUPURA, NusaBali
Wacana memberikan bantuan bedah rumah dari Pem-

kab Badung kepada enam kabupaten di Bali, meliputi Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Jembarana, Buleleng, bakal direalisasikan tahun ini. Rencananya ada sebanyak 2.000 rumah yang bakal dibedah, masing-masing kabupaten menerima sesuai dengan kebutuhan, per rumah dihargai senilai Rp 50 juta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung Ketut Gede Suyasa, mengungkapkan bantuan

bedah rumah kepada enam kabupaten sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan. "Kalau beliau (Bupati) sudah menyatakan direalisasikan, pasti jalan. Secara total anggaran yang disiapkan Rp 100 miliar untuk enam kabupaten. Tetapi kalau distribusinya ke masing-masing Bapak Bupati yang memutuskan," ujarnya, Kamis (14/2).

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, menegaskan guna merealisasikan program bantuan bedah rumah tersebut, alokasi anggaran

sudah disiapkan. Tinggal menunggu tindak lanjut dari kabupaten penerima saja, karena anggaran baru bisa cair setelah ada pengajuan proposal. Andaikan tidak semua kecamatan dapat tercover, Bupati mengisyaratkan agar ada kebijakan dari daerah penerima bantuan. Misalkan, di kabupaten A tahun ini beberapa kecamatan saja, tahun berikut sisanya lagi. "Ini harus ada data yang diajukan dari masing-masing kabupaten penerima, supaya jelas," kata Bupati

Giri Prasta.

Bupati asal Pelaga, Kecamatan Petang, itu menjelaskan nominal bantuan bedah rumah senilai Rp 50 juta untuk setiap rumah. Jadi total Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 100 miliar untuk merealisasikan program ini. "Kami inginnya sih diberikan dana (tunai). Harapan kami diawasi oleh kabupaten dan masyarakat sekitar," tandasnya.

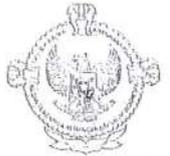
Dengan bantuan bedah rumah yang diberikan, Bupati Giri Prasta berharap

program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dapat terwujud. "Nanti Badung memberikan (bedah rumah), provinsi memberikan, pusat juga memberikan, jadi semesta berencana. Semesta itu menyeluruh, berencana itu terpola," tuturnya.

Disinggung kemungkinan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar menerima bantuan program bedah rumah serupa, Bupati Giri Prasta menyatakan seluruh kabupaten/kota memiliki kesempatan

yang sama dengan enam kabupaten penerima. "Bisa saja dapat (bantuan bedah rumah) berdasarkan usulan," ucap Bupati Giri Prasta.

Sekadar mengingatkan, wacana memberikan bantuan bedah rumah sebanyak 2.000 unit disampaikan Bupati Giri Prasta saat pemaparan evaluasi program pembangunan Kabupaten Badung Semester I Tahun 2017 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali di Denpasar. Pernyataan itu disampaikan secara terbuka. **asa**



Pemkab Badung Gelontorkan Dana ke Desa Rp 675 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung menggelontorkan dana kepada 46 desa di Badung. Dana yang diserahkan tersebut bersumber dari Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2019 dengan total Rp 675 miliar lebih. Masing-masing desa menerima berkisar Rp 11,9 miliar hingga Rp 21,7 miliar. Dana untuk desa diserahkan Wakil Bupati Badung didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) I Putu Gede Sridana kepada perbekel se-Badung, Kamis (14/2) kemarin di Puspem Badung.

Kepala DPMD Putu Gede Sridana menjelaskan, Dana Desa yang diterima dari pemerintah pusat sebesar Rp 52.584.767.000. Masing-masing desa paling sedikit menerima Rp 900 juta dan paling besar Rp 2 miliar. Alokasi Dana Desa dari Dana Perimbangan sebesar Rp 44.660.525.600, masing-masing desa paling sedikit menerima Rp 750 juta dan paling besar Rp 1,4 miliar. Kemudian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah totalnya sebesar Rp 577.969.447.185. Masing-masing desa paling sedikit menerima Rp 10 miliar dan paling besar Rp 18,5 miliar.

"Total dana ke desa tahun 2019

sebesar Rp 675.214.739.785. Paling sedikit desa menerima Rp 11,9 miliar dan paling besar Rp 21,7 miliar. Pembagian dana kepada desa ini telah ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 115/0419/HK/2019," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, ada beberapa indikator sebagai dasar pembagian dana ke desa yaitu jumlah penduduk, jumlah banjar, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesultian geografis. Wabup Suiasa mengatakan, mengingat begitu besarnya dana yang diterima oleh desa, maka menjadi penting penyerahan dana ini tidak secara langsung ditransfer, namun sebelumnya pemerintah daerah mengundang para perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud prinsip transparansi anggaran. Dalam hal ini, BPD sebagai unsur pemerintahan desa salah satu fungsinya memberi pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran di desa sejak awal hingga penerimaan dan pemanfaatan dana.

Dengan begitu, BPD akan melaksanakan fungsinya sebagai pendorong, motivator perbekel untuk mempercepat eksekusi anggaran sesuai dengan perencanaan yang diputuskan bersama antara perbekel dengan BPD. Perbekel juga diminta menggunakan prinsip-prinsip ang-

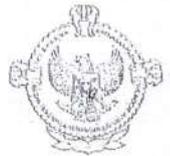
garan yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ini memberi harapan dan peluang untuk berakselerasi lebih banyak dalam rangka percepatan pembangunan masyarakat. Namun secara teknis ini juga beban buat mereka, pertanggungjawaban cukup berat. Untuk itu BPD dan perbekel agar bersinergi, agar alur pemanfaatan dana ini baik secara aturan, penyiapan administrasi dan tata pelaksanaannya di masyarakat tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Selain itu, perangkat daerah juga diminta ikut bersama-sama memberikan pendampingan dan tuntunan kepada desa sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Inspektorat juga diharapkan terus melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa. "Inspektorat kami minta melakukan pendampingan, tuntunan dan pengawasan setiap saat, diminta ataupun tidak. Kita menginginkan sejak awal pemerintah desa ada yang memberikan arah yang pasti, sehingga masalah hukum di kemudian hari tidak terjadi dan kebermanfaatannya untuk mewujudkan kesejahteraan benar-benar dapat tercapai," pungkasnya. (ad496)

Edisi : Jumat, 15, Feb, 2019

Hal : 3



Korupsi di Semua Lini Tabanan Serius Perangi

SETELAH mendapatkan penghargaan peringkat II se-Bali di bawah Pemprov Bali terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dirilis KPK melalui aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP), Pemkab Tabanan semakin memantapkan upaya tersebut agar pencegahan dan pemberantasan korupsi menyentuh semua lini mulai dari aparat pemerintah sampai masyarakat. Upaya ini ditegaskan melalui penandatanganan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kabupaten Tabanan Tahun 2019 yang digelar Kamis (14/2) kemarin di Kejaksaan Negeri Tabanan.

Acara ini selain dihadiri Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti juga dihadiri oleh seluruh Forkompinda Tabanan,

di antaranya Kajari Tabanan Ni Wayan Sinaryati, Kapolres Tabanan AKBP Made Sinar Subawa, Ketua Pengadilan Tinggi Tabanan Made Sukerani, Dandim 1619/Tabanan Hasan Abdullah, Perwakilan Kalapas Tabanan, Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi, Wakil Ketua DPRD Tabanan, Sekda Tabanan I Gede Susila, serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

Bupati Eka Wiryastuti menjelaskan, sebelumnya telah dibentuk tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di tingkat kabupaten yang secara berkala melakukan update data melalui aplikasi MCP yang dipantau langsung oleh KPK RI. Peman-tauan meliputi delapan area intervensi yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu,

kapabilitas APIP, manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Selain itu, Pemkab Tabanan juga telah melakukan berbagai langkah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan capaian kinerja dan prestasi seperti penyajian laporan keuangan secara tepat waktu serta berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB telah mendapat predikat penilaian B sejak tahun 2017.

"Dalam pencapaian tersebut, tentunya ini merupakan komitmen kita bersama mewujudkan cita-cita kita ini agar tercapai dan bisa memberikan *image* yang baik terhadap Tabanan. Kami

tahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, melalui implementasi kebijakan pelayanan maupun mutu hasil karya khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi dari semua elemen.

Ia mengaku siap menunjukkan komitmen dalam pelayanan publik. "Kami Kejaksaan Negeri Tabanan siap berkomitmen melayani publik dengan berbekal BISH (bekerja ikhlas sepenuh hati) dengan prinsip 5S (senyum, salam, sapa, dan sopan santun), dengan visi untuk mewujudkan Kejaksaan Negeri Tabanan selaku penegak hukum yang ber-taksu, tanggung jawab,

sangat mengapresiasi upaya dan kerja sama yang telah dilakukan oleh seluruh pihak terkait," ungkapnya.

Dirinya pun mengungkapkan kebanggaannya atas terselenggaranya acara penandatanganan Zona Integritas Menuju WBK Kabupaten Tabanan Tahun 2019 ini. Menurutnya, ini merupakan hal yang baik apalagi dilakukan secara bersama-sama.

Sebelumnya, Kajari Tabanan Ni Wayan Sinaryati mengungkapkan, Zona Integritas adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Ini merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerin-



ZONA INTEGRITAS - Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kabupaten Tabanan Tahun 2019 dicanangkan Kamis (14/2) kemarin di Kejaksaan Negeri Tabanan.

akuntabel, komitmen, sukses dan utama," jelasnya.

Dia berharap penandatanganan Zona Integritas ini bukan hanya seremonial, melainkan menjadi langkah awal yang nantinya disusun dengan tindakan nyata dalam mewujudkan WBK dan WBBM. "Dalam

mewujudkan komitmen ini kami tidak bisa sendiri. Kami butuh dukungan penuh dari Forkompinda Tabanan dan seluruh *stakeholder* untuk berjalan maju, namun juga berlari kencang demi tercapainya WBK dan WBBM," tegasnya. (ad495)

Edisi : Jumat, 15, Feb, 2019

Hal : 7



Terkait Proyek RTH Taman Bung Karno DPRD Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Singaraja (Bali Post) -

Komisi II DPRD Buleleng menyikapi serius gagalnya kontraktor menyelesaikan proyek tahap III Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno. Karena itu, dewan mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Wakil rakyat juga memanggil Kepala Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan (Perkimta) Ni Komang Surattini, Senin (18/2) pekan depan. Di samping itu, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa, dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Buleleng turut diminta hadir menyikapi gagalnya proyek RTH Taman Bung Karno, itu tuntas tepat waktu.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, Kamis (14/2) kemarin, mengatakan proyek itu tidak tuntas dikerjakan sesuai tanggal kontrak berakhir. Nyatanya, belakangan ini memang sering terjadi. Jadi, lucu kegagalan itu terus berulang. Apalagi proyek RTH Bung Karno itu ditunggu-tunggu masyarakat. Pasalnya, RTH Bung Karno itu diyakini menjadi kebanggaan warga. Namun, justru tidak bisa tuntas sesuai kontrak berakhir.

Pada rapat dengar pendapat itu, pemerintah dituntut melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dia juga meminta pelaksanaan proyek strategis itu prosedur lelangnya diperketat. Sehingga, peserta tender hanya diikuti kontraktor yang memiliki modal kerja.

"Ini sebetulnya masalah serius. Kami ingin tahu apa sebenarnya masalah krusial hingga proyek itu gagal. Apalagi tahun 2018 yang lewat tidak hanya patung Bung Karno

yang molor, termasuk juga ada beberapa proyek lainnya tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Bahkan, pemborong di-blacklist," katanya.

Di sisi lain, mantan Perbekel Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini mengaku prihatin dengan molornya pembangunan RTH Bung Karno itu. Mengingat proyek itu sangat dinantikan masyarakat. Patung Bung Karno itu seharusnya terpasang akhir 2018 lalu. Namun, ternyata belum tuntas dikerjakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek tahap tiga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada gagal dituntaskan. Pelaksanaan proyek yang sudah mendapatkan perpanjangan pekerjaan selama 50 hari itu tidak dapat dituntaskan sesuai jadwal yang ditetapkan. Atas kondisi itu, Dinas Perumahan Permukiman dan

Pertanahan (Perkimta) menitipkan bagian patung yang belum tuntas dikerjakan itu di Yogyakarta.

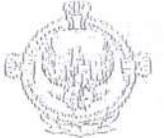
Dalam proyek lanjutan, seharusnya pelaksana menuntaskan pemasangan patung Bung Karno itu. Patung yang semestinya berdiri kokoh di areal inti RTH itu ternyata tidak selesai dikerjakan. Sampai kontrak berakhir, pelaksana baru menyelesaikan bagian kaki dan kepalanya. Sedangkan bagian badan patung Bung Karno, hingga kini belum selesai. Karena itu, masih dititipkan di bengkel kerjanya sang perajin di Yogyakarta. (kmb38)



Putu Mangku Budiasa

Edisi : Jumat, 15, Feb, 2019

Hal : 8



Utang Rp 605 M Belum Terbayar

● Pemkab Badung Baru Bisa Cicil Utang Rp 95 M



TRIBUN BALI/ AGUS ARYANTA

WAYAN ADI ARNAWA

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Melesetnya capaian APBD Kabupaten Badung di tahun 2018 menyebabkan kabupaten terkaya di Bali ini masih menyisakan utang di tahun 2019. Utang bersumber dari tunggakan pengerjaan proyek. Total utang Rp 700 miliar dan baru terbayar Rp 95 miliar. Sisanya Rp 605 miliar belum terbayar.

Sekretaris Daerah (Sekda)

Badung, Wayan Adi Arnawa tak menampik perihal tersebut. Namun, Pemkab Badung kata dia telah berupaya melunasi tunggakan yang di antaranya Rp 300 miliar merupakan proyek fisik yang mencapai 24 proyek. "Sudah.. sudah dibayar, aman-aman kan bertahap akan kami lunasi

BERSAMBUNG ● HAL 7

Utang Rp 605 M...

Sambungan Hal.1

pembayarannya," ucapnya ditemui usai menghadiri acara Mutasi Pejabat Eselon III dan IV, Kamis (14/2).

Menurutnya, pembayaran tunggakan menjadi prioritas di tahun 2019. Pihaknya, berupaya menuntaskan kewajiban di 2018 hingga pertengahan 2019 ini. Ditanya mengenai berapa yang terbayarkan hingga pertengahan Februari ini, pihaknya mengaku sudah melebihi Rp 95 miliar.

"Kami tetap berproses, ya, enam bulan astungkara bisa selesai. Kami prioritaskan di 2019 ini pembayaran utang. Hingga saat ini sudah ada sekitar Rp 95 miliar lebih yang sudah kami bayar," tegasnya.

Sebelumnya, birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan, itu berjanji akan segera melunasi tunggakan yang belum

dibayarkan. "Kami berterimakasih, karena pihak rekanan mau mengerti kondisi kami, dan tentunya kami akan segera membayar sisa yang belum terbayarkan," ungkapnya.

Ia berjanji akan melunasi semua sisa tunggakan proyek selama setahun anggaran. "Ini menjadi prioritas kami, kalau tidak ada hal yang urgent tentunya pembayaran akan difokuskan ke sini (tunggakan utang)," katanya.

Mantan Kepala Badan Pendapatan dan Pesedahan Agung itu juga akan memberikan bunga atas tunggakan yang belum terbayarkan kepada rekanan. "Sesuai aturan kami berikan bunga, kalau tidak salah 12 persen per tahun, coba tanya lagi BKAD supaya tidak salah,"

tegasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung Ketut Gede Suyasa juga mengatakan hal yang sama, bahwa tunggakan Badung sudah terbayarkan sekitar Rp 95 miliar lebih.

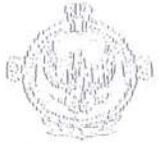
"Tetap kami berproses untuk pembayaran tersebut. Ini juga sesuai arahan Pak Sekda," ujarnya.

Pihaknya juga menegaskan pembayaran tunggakan ini akan diprioritaskan Pemkab Badung untuk dibayar sehingga tunggakan yang belum terbayarkan akan cepat lunas.

"Walaupun diprioritaskan, tapi tetap tidak akan mengganggu pembayaran operasional di Kabupaten Badung ini, seperti gaji pegawai, biaya listrik dan yang lainnya," pungkasnya. (gus)

Edisi : Jumat, 15, Feb, 2019

Hal : 1



Dana Desa Terendah Rp 11 M, Tertinggi Rp 21,7 M

■ Ingatkan Perbekel untuk Hati-hati Kelola Dana Desa

MANGUPURA, TRIBUN

BALI - Sebanyak 46 desa di Badung mendapatkan dana hingga belasan miliar. Dana yang masuk ke desa diterima dari Dana Desa, kemudian Dana Perimbangan, dan Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah total dana terendah setiap desa Rp 11,9 miliar dan tertinggi sampai Rp 21,7 miliar.

Dana Desa yang diterima dari Pemerintah Pusat/APBN Rp 52,5 miliar, masing-masing desa paling sedikit menerima Rp 900 juta dan paling besar Rp 2 miliar. Alokasi Dana Desa dari Dana Perimbangan sebesar Rp 44.660.525.600, masing-masing desa paling sedikit menerima Rp 750 juta dan paling besar Rp 1,4 mi-

liar. Dana sejak awal, hingga penerimaan dan pemanfaatan dana desa. Sehingga BPD akan melaksanakan fungsinya sebagai pendorong, motivator dari perbekel untuk mempercepat melakukan eksekusi terhadap anggaran yang diterima, sesuai perencanaan yang diputuskan bersama antara Perbekel dengan BPD," urainya.

Secara teknis, anggaran yang besar akan membuat beban para perbekel yang harus mempertanggungjawabkan. "Untuk itu BPD dan perbekel agar bersinergi, agar alur pemanfaatan dana ini baik secara aturan, penyiapan administrasi dan tata pelaksanaannya tepat sasaran sesuai aturan," tegasnya.

liar. Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 577.969.447.185, masing-masing desa paling sedikit menerima Rp 10 M dan paling besar Rp 18,5 miliar. Sehingga total dana ke desa tahun 2019 sebesar Rp 675.214.739.785, dengan paling sedikit desa menerima Rp 11,9 miliar dan paling besar Rp 21,7 miliar.

Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa mengatakan dengan dana yang cukup besar diharapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut mengawasi dana tersebut. "Sebagai wujud prinsip transparansi anggaran, BPD sebagai unsur pemerintahan desa salah satu fungsinya memberi pengawasan terhadap pelaksanaan penganggaran di

Kepada perangkat daerah juga diminta ikut bersama-sama memberikan pendampingan. Inspektorat juga diharapkan terus melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Badung I Putu Gede Sridana mewanti-wanti perbekel tetap pada koridor hukum dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa. Ia tak ingin kasus korupsi ABPDes mantan Perbekel Baha, Mengwi terulang. Mengingat dana desa yang digelontorkan besar, pengawasan perlu dilakukan dengan sistem keuangan desa (Sikeudes) di bawah binaan BPKP, pola pola verifikasi oleh tim yang melibatkan kejaksaan. (gus)

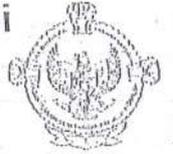


ISTIMEWA

SERAHKAN DANA - Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Putu Gede Sridana menyerahkan dana desa kepada Perbekel se-Badung, Kamis (14/2) di Puspem Badung.

Edisi : Jumat, 15, Feb, 2019

Hal : 6



Dana Besar, Beban pun Berat

Terkait Kucuran untuk Desa di Badung

MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung telah membagikan dana kepada 46 desa di Badung, Kamis (14/2) di Puspem Badung. Dan itu bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) tahun 2019 dengan total Rp 675 miliar lebih.

Kepala Dinas PMD Putu Gede Sridana menjelaskan, DD yang diterima dari pemerintah Pusat/APBN sebesar Rp 52.584.767.000, masing-masing desa paling sedikit menerima Rp900 juta dan paling besar Rp 2 miliar. Berikutnya, ADD dari Dana Perimbangan sebesar Rp 44.660.525.600, masing-masing desa paling sedikit menerima Rp750 juta dan paling besar Rp 1,4 miliar. Sedangkan DBH-PDRD sebesar Rp577.969.447.185, masing-masing desa paling sedikit menerima Rp10 miliar dan paling besar Rp18,5 miliar.

Kata dia, ada beberapa indikator sebagai dasar pembagian dana ke desa yaitu jumlah penduduk, jumlah banjar, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis. "Total dana ke desa tahun 2019 sebesar Rp. 675.214.739.785, paling sedikit desa menerima Rp11,9 miliar dan paling besar Rp21,7 miliar. Pembagian dana kepada Desa ini telah ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 115/0419/HK/2019," jelasnya.

Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa mengatakan, begitu besarnya dana yang diterima oleh desa, menjadi penting penyerahan dana ini tidak secara langsung ditransfer tetapi pemerintah daerah mengundang para Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai wujud prinsip transparansi anggaran, BPD sebagai unsur pemerintahan desa salah satu fungsinya memberi pengawasan terhadap pelaksanaan



"Kami akui ini menjadi beban tersendiri bagi perbekel dalam mengelola dana besar, di balik ini memberi harapan dan peluang untuk berakselerasi lebih banyak dalam rangka percepatan pembangunan masyarakat. Namun secara teknis ini juga beban buat mereka, pertanggungjawaban cukup berat."

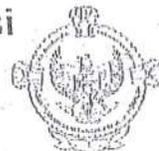
KETUT SUIASA
Wakil Bupati Badung

penganggaran di desa sejak awal hingga penerimaan dan pemanfaatan dana desa. Perbekel juga diminta menggunakan prinsip-prinsip anggaran yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami akui ini menjadi beban tersendiri bagi perbekel dalam mengelola dana besar, di balik ini memberi harapan dan peluang untuk berakselerasi lebih banyak dalam rangka percepatan pembangunan masyarakat. Namun secara teknis ini juga beban buat mereka, pertanggungjawaban cukup berat," tegasnya.

Imbuhnya, kepada perangkat daerah juga diminta ikut bersama-sama memberikan pendampingan dan tuntunan kepada desa sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Inspektorat juga diharapkan terus melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada desa. "Inspektorat kami minta melakukan pendampingan, tuntunan dan pengawasan setiap saat, diminta ataupun tidak. Kita menginginkan sejak awal pemerintah desa ada yang memberikan arah yang pasti, sehingga masalah hukum di kemudian hari tidak terjadi," pungkasnya. (dwi/yor)

Edisi : Jumat, 15, Feb, 2019

Hal. : 4

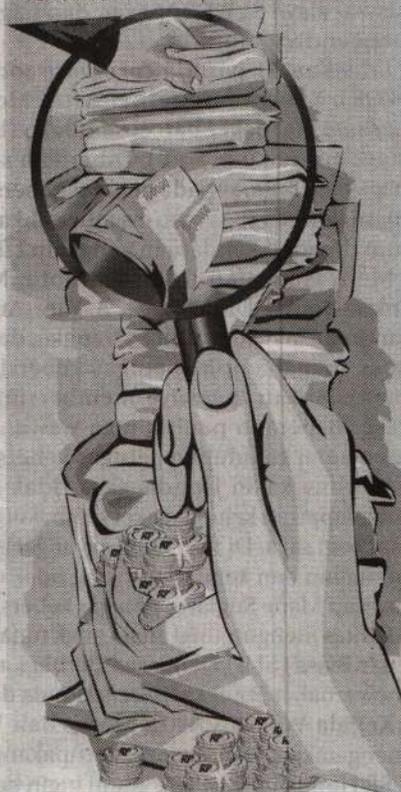


Sambungan

Kucuran DD, ADD, DBH-PDRD di Badung 2019

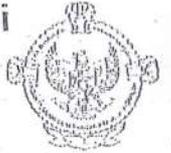
No	Desa	Total Anggaran (Rp)
1	Pelaga	21.758.529.825
2	Dalung	21.547.957.284
3	Belok Sidan	18.637.945.676
4	Taman	18.484.635.702
5	Ungasan	18.055.029.542
6	Darmasaba	16.881.988.047
7	Pecatu	16.876.385.442
8	Sibang Gede	16.870.541.821
9	Bongkasa	16.848.867.090
10	Gulingan	16.773.594.403
11	Carangsari	16.433.105.047
12	Tibubeneng	16.142.350.146
13	Sulagai	16.137.607.730
14	Penarungan	15.722.170.920
15	Petang	15.504.247.674
16	Mengwitani	15.178.456.279
17	Munggu	15.081.082.120
18	Mengwi	14.997.313.903
19	Abiansemal	14.826.343.010
20	Blahkiah	14.708.227.108
21	Sembung	14.554.279.221
22	Cemagi	14.326.194.245
23	Buduk	14.216.156.279
24	Werdi Bhuwana	14.010.277.504
25	Sangheh	13.806.477.877
26	Kekeran	13.743.040.304
27	Sibang Kaja	13.717.158.289
28	Dauh Yeh Cani	13.615.702.745
29	Mambal	13.594.113.392
30	Baha	13.587.830.395

31	Canggu	13.190.681.427
32	Sedang	13.137.226.681
33	Punggul	13.113.028.288
34	Sobangan	12.959.943.924
35	Selat	12.871.429.769
36	Kutuh	12.718.690.051
37	Mekar Bhuwana	12.425.430.457
38	Bongkasa Pertiwi	12.201.719.440
39	Pangsang	12.184.776.789
40	Ayunan	12.162.964.617
41	Angantaka	12.158.901.350
42	Tumbakbayuh	11.993.997.926
43	Pererenan	11.946.177.539
44	Jagapati	11.944.536.367
45	Getasan	11.854.375.969
46	Kuwum	11.713.246.302



Edisi : Jumat, 15, Feb, 2019

Hal. : 4



ANGGARAN Badung Prioritas Bayar Tunggakan

MANGUPURA - Tunggakan sebesar Rp700 miliar pada tahun anggaran 2018 menjadi beban tersendiri bagi Kabupaten Badung. Maka, tahun 2019 ini pun kabupaten terkaya di Bali ini pun menjadikan pembayaran tunggakan sebagai prioritas.

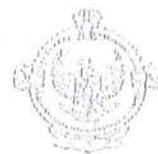
"Kita tetap berproses, ya. Enam bulan, *astungkara* bisa selesai. Kita prioritaskan di (tahun) 2019 ini pembayaran utang," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Wayan Adi Arnawa usai menghadiri mutasi pejabat eselon III dan IV, Rabu (13/2) lalu.

Dia menjelaskan, pemerintah telah berupaya melunasi tunggakan yang di antaranya Rp 300 miliar merupakan proyek fisik yang mencapai 24 proyek. Targetnya, pertengahan 2019 tunggakan itu sudah dibayar lunas. "Sudah, sudah dibayar, aman-aman *kan* bertahap. Sudah melebihi Rp 95 miliar (dibayar)," terang birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan ini.

Pendapatan Kabupaten Badung tahun 2018 meleset. Dampaknya, menyisakan hutang atau tunggakan pembayaran proyek fisik Rp 700 miliar yang dibayar di tahun 2019 ini. Pembayaran tunggakan belum lunas tetapi Bupati Badung Nyoman Giri Prasta kembali mengguliarkan program bedah rumah. Tak tanggung-tanggung, Bupati Badung berjanji merealisasikan 2.000 bedah rumah di enam kabupaten se-Bali. (dwi/yor)

Edisi : Jumat, 15-2-2019

Hal. : 4



Pemkab Badung Cicil Tunggakan Tahun 2018

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Badung tengah berupaya mencicil tunggakan yang disebut-sebut mencapai Rp 700 miliar. Tunggakan tersebut salah satunya berasal dari 24 proyek fisik tahun 2018 yang sampai sekarang belum terbayarkan. Informasinya, untuk 24 proyek fisik tersebut tunggakannya mencapai Rp 300 miliar.

Upaya pemerintah mencicil tunggakan sebesar ratusan miliar rupiah tersebut diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa, usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebanyak 184 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional tertentu di lingkungan Pemkab Badung, Rabu (13/2). Menurutnya, sejauh ini tunggakan yang telah terbayar sekitar Rp 95 miliar.

"Sudah dibayar, aman, *kan* bertahap. Sekarang sudah melebihi Rp 95 miliar," ungkap Adi

Arnawa.

Adi Arnawa menyampaikan terima kasih kepada rekanan, sebab mau mengerti kondisi yang dihadapi Pemkab Badung. Pejabat asal Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, itu menargetkan tunggakan pada tahun 2018 akan menjadi prioritas di 2019 ini. Bahkan, pihaknya berupaya menuntaskan kewajiban tersebut dalam kurun waktu enam bulan ke depan. "Tetap berproses (membayar tunggakan), enam bulan astungkara bisa selesai. Kami prioritaskan di 2019 ini pembayaran utang," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung Ketut Gede Suyasa juga mengatakan hal yang sama. Tunggakan Badung secara bertahap sudah terbayarkan. "Kami berproses untuk pembayarannya (tunggakan). Ini juga sesuai arahan Pak Sekda," ucapnya.

Meski Pemkab Badung memprioritaskan membayar tungga-

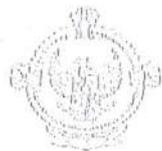
kan-tunggakan tersebut, namun khusus keperluan wajib salah satunya untuk gaji pegawai tidak terganggu. "Semakin cepat semakin bagus (tunggakan terbayarkan)," imbuh Suyasa.

Sekarang dalam upaya melunasi seluruh tunggakan tersebut, Pemkab Badung akan memaksimalkan pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak hotel dan restoran (PHR) tahun 2019. Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutarna, Kamis (14/2) petang, menyatakan tahun ini PAD ditargetkan Rp 6,6 triliun.

Disinggung target PAD pada tahun 2018, Sutarna mengakui memang di bawah target. "Target PAD tahun lalu tidak jauh berbeda dengan tahun ini (2019). Namun, terealisasi Rp 4,4 triliun," ungkapnya. Sayangnya, mengenai perihal tunggakan yang harus dibayar Pemkab Badung, Sutarna enggan memberikan komentar. **asa**

Edisi : Jumat, 15, Feb, 2019

Hal : 2



Lahan Eks Bank Perniagaan Umum Dihibahkan

★ Bakal Dijadikan RTH Berkonsep
Taman Bacaan

Sejak menjadi aset sitaan Negara, lahan seluas 8 are tak terurus. Kini dijanikan menjadi fasilitas publik berupa taman bacaan di ruang terbuka hijau.

SINGARAJA, NusaBali

Lahan eks Bank Perniagaan Umum (BPU) di pojok Jalan Ga-

jah Mada-Jalan Letkol Wisnu Singaraja, segera menjadi aset Pemkab Buleleng. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, kini tengah memproses penghibahan lahan tersebut ke Pemkab Buleleng. Rencananya, lahan tersebut akan dimanfaatkan oleh Pemkab Buleleng sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dengan konsep Taman Bacaan.

Data Badan Keuangan Daerah (BKD) Bidang Aset menyebut, lahan eks BPU seluas kurang lebih 8 are, sudah cukup lama dimohon oleh

Pemkab Buleleng. Lahan tersebut telah menjadi aset negara yang dikelola oleh Dirjen Pengelolaan Kekayaan Negara, Kemenkeu. Permohonan diajukan karena Pemkab ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat Buleleng.

Selama ini, sejak menjadi sitaan Negara pasca dilikuidasi pada tahun 2001, lahan tersebut tidak terurus. Bangunan gedung yang berdiri di atas lahan sebagai kantor PBU dulunya, telah kropos hingga ambruk di tempat. Setelah bangunan, lokasi itu pun terlihat kumuh karena banyak ditumbuhi tanaman liar.

Kabarnya, permohonan atas lahan itu telah disetujui oleh Dirjen Pengelolaan Kekayaan Negara. Pihak Dirjen berencana menghibahkan lahan tersebut kepada Pemkab Buleleng. Saat ini penghibahan itu masih dalam proses. Pemkab Buleleng berencana memanfaatkan lahan itu sebagai RTH dengan konsep Taman Bacaan.

Kepala BKD Buleleng, Bimantara melalui Kabid Aset, Made Pasda Gunawan yang dikonfirmasi, Kamis (14/2) menyebut, kepastian lahan eks BPU dihibahkan ke Pemkab Buleleng disampaikan Direktorat Pengelolaan Kekayaan

Negara dan Sistem Informasi, Dirjen Pengelolaan Kekayaan Negara, Kemenkeu tertanggal 22 Januari 2019. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Indra Surya. "Intinya penghibahan itu masih dalam proses. Pihak Direktorat juga sudah mengizinkan lahan tersebut dibersihkan ditata oleh Pemkab," kata Pasda.

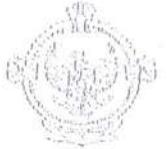
Disinggung rencana pemanfaatan setelah lahan eks BPU dihibahkan ke Pemkab Buleleng? Pasda Gunawan menyebut, pemanfaatannya nanti diserahkan kepada

kebijakan Bupati. Pihaknya hanya memproses masalah status aset tersebut. Namun informasi yang didapat, lahan itu akan dijadikan RTH. "Disini hanya memproses permohonan dan pencatatan aset. Untuk pemanfaatannya terserah pimpinan Pak Bupati. Kalau tidak salah mau dipakai RTH dan Taman Bacaan," ujarnya.

Informasinya, PNS Pemkab Buleleng Jumat (15/2) hari ini akan mengadakan pembersihan dan penataan di atas lahan tersebut, setelah mendapat kepastian lahan itu dihibahkan ke Pemkab Buleleng. **k19**

Edisi : Jumat, 15, Feb, 2019

Hal : 4



Kajari Tabanan Teken Zona Integritas Bebas Korupsi

TABANAN, NusaBali

Untuk memberantas korupsi dan mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan lakukan Penandatanganan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, bekerjasama dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Tabanan, Kamis, (14/2). Dengan penandatanganan tersebut Kejari Tabanan berkomitmen akan melayani masyarakat.

Kepala Kejari Tabanan, Ni Wayan Sinaryati menjelaskan Zona Integritas adalah suatu Predikat yang diberikan kepada instansi Pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui reformasi birokrasi yang meru-

pakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Dengan hal itu dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, melalui implementasi kebijakan pelayanan maupun mutu hasil karya, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, serta partisipasi dari semua elemen," ungkapnya.

Oleh karena itu diharapkan penandatanganan zona integritas tak hanya menjadi seremonial saja tetapi lebih ditunjukkan dengan bentuk nyata. "Saya harapkan, semua unsur ikut terlibat mendukung agar Tabanan terbebas dari ka-



• NUSABALI/DESAK

Penandatanganan Zona Integritas di Kejari Tabanan, Kamis (14/2).

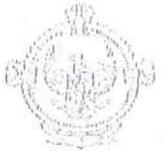
korupsi," imbuh Sinaryati. Sinaryati menegaskan, terpenting agar seluruh pihak tak terjerat kasus korupsi bermula dari komitmen diri

sendiri dalam menjalankan tugas. Seperti bekerja sesuai dengan aturan, tidak menerima suap maupun gratifikasi. "Jika semua menerapkan ini niscaya

korupsi dan pelayanan bersih bisa terwujud," tegasnya.

Sementara itu Sinaryati mengakui secara riil tingkat korupsi di Tabanan menurun. Karena dari data di tahun 2017 dari 7 kasus yang ditangani dan di tahun 2018 menurun menjadi 5 kasus. "Tahun 2019 juga kami baru bidik satu kasus karena masih ditahap penyelidikan belum bisa kami ungkap," tegasnya.

Disisi lain Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryasuti mengatakan akan mendukung penuh dalam mewujudkan zona integritas bebas korupsi. Karena dalam menjalankan pemerintahan di setiap OPD di Tabanan telah disediakan pengawasan. "Jadi masing-masing OPD mengawasi kinerja staf, kemudian koordinasi dengan baik dan dibuatkan sistem agar celah korupsi bisa ditepis," tandasnya. **de**



Realisasikan Bantuan 2.000 Bedah Rumah ke Enam Kabupaten

MANGUPURA, NusaBali

Wacana Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan bantuan 2.000 bedah rumah di enam kabupaten se-Bali segera direalisasikan. Program tersebut menyasar kabupaten penerima bantuan penyesihan pajak hotel dan restoran (PHR) seperti Kabupaten Bangli, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng.

"Ini adalah salah satu rasa kepedulian kita kepada masyarakat. Kajian normatifnya sudah kita lakukan," jelasnya di rumah jabatan Bupati Badung, Sabtu (16/2).

Bupati Giri Prasta mengungkapkan, pemkab /kota bisa memberikan bantuan berupa bantuan keuangan khusus (BKK) dan bantuan keuangan umum (BKU). Selama ini, BKK dari Badung ke kabupaten lain sudah berjalan. BKU bisa diberikan kepada pemerintah lain melalui APBD dan dikelola oleh mereka sendiri. "Apa yang kita lakukan ini murni untuk membantu kabupaten lainnya. Kalau pusat membantu, provinsi membantu, kita di kabupaten juga membantu, sehingga bedah rumah cepat terselesaikan," katanya.

Bupati Giri Prasta mengungkapkan, setiap penerima bantuan bedah rumah mendapat Rp 50 juta. Dengan demikian, total anggaran yang digelontorkan pemkab untuk program ini sekitar Rp 100 miliar. Sekarang tinggal menunggu tindak lanjut dari kabupaten penerima. Anggaran baru bisa cair setelah ada pengajuan proposal.

"Yang perlu bedah rumah *kan* sudah pasti ekonominya sangat di bawah. Misalnya jika masyarakat membutuhkan bedah rumah Rp 50 juta tapi hanya dibantu Rp 25 juta, masak mereka harus berutang lagi," tegas Bupati



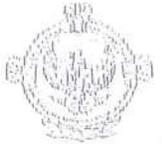
Giri Prasta sembari menyatakan akan mengalokasikan jatah lebih kepada kabupaten yang paling membutuhkan.

Terpenting adalah penggunaan dana tersebut harus diawasi pemerintah setempat. Jangan sampai dana bedah rumah yang diberikan digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. "Yang terpenting eksekusinya. Kita tidak akan berhenti di bedah rumah. Sesuai komitmen sebelumnya, kami akan terus membantu melalui penyesihan dana PHR sesuai kebutuhan," tukasnya.

Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menambahkan, program bedah rumah di kabupaten lain sudah merupakan komitmen Pemkab Badung. Artinya, Badung tidak hanya memikirkan kesejahteraan masyarakatnya, namun juga masyarakat kabupaten lain.

Program tersebut, kata Wabup Suiasa, merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Badung terhadap kebutuhan masyarakat lain di luar Badung. "Apa yang kita berikan kepada masyarakat Badung juga kita berikan kepada masyarakat lain. Jadi komitmen sama rata dan sama rasa jalan juga di kabupaten lain. Itu prinsipnya," tegasnya. **asa**





Proyek Puskesmas Baru 70 Persen

Puskesmas Pembantu Desa Dauh Yeh Cani Badung Lewati Deadline

MANGUPURA, TRIBUN BALI

- Proyek yang molor di Badung masih banyak yang belum dikerjakan oleh rekanan. Seperti pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Dauh Yeh Cani, Abiansemal yang baru selesai 70 persen, padahal deadlinenya sudah sejak 23 Januari lalu.

Dari hasil pantauan di lapangan, terlihat bahan material masih menumpuk seperti pasir, batu bata paras dan bahan material lain. Tidak ada terlihat aktivitas pengerjaan bangunan. Hanya ada beberapa titik yang baru dikerja-

kan seperti, penyengker, Padmasana, bangunan puskesmas dan parkir. Bangunan itu masih terlihat kekurangannya seperti pedon pintu, engsel maupun kelengkapan kamar mandi.

Proyek yang digarap PT MGK itu dengan anggaran Rp 2.407.799.900 semestinya rampung 23 Januari 2019. Namun hingga hari ke 25 ini bangunan belum selesai. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung IGA Arinda Trisnawati, mengatakan mangkraknya proyek karena

tidak sesuai target pengerjaan.

"Kami dari PUPR langsung melakukan pemutusan kontrak," ujarnya Sabtu (16/2). "Banyak yang belum terselesaikan seperti tempelan *style* Bali juga belum, peralatan pemadam kebakaran dan masih banyak lagi yang kurang," jelasnya.

Menurutnya pengerjaan itu baru 70 persen, sehingga perlu dilakukan pengerjaan kembali. Dalam pengerjaan tersebut pihaknya masih melakukan proses pengerjaan kembali dengan menunjuk kontraktor un-

PROYEK MANGKRAK DI BADUNG

- Pembangunan RKB dan Renovasi Halaman SD Negeri 3 Legian **RP 2,8 MILIAR**
- Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian **RP 2,1 MILIAR**
- Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani **RP 2,4 MILIAR**
- Pembangunan Wantilan Melasti di Club Med dengan **RP 1,3 MILIAR**
- Penataan halaman Puskesmas Pembantu Punggul **RP 1,7 MILIAR**

DEADLINE

Akhir Januari

DENDA

Penerapan denda untuk rekanan yang gagal mengerjakan tepat waktu



INFOGRAFIS: TRIBUN BALI/DWI S

tuk melanjutkan pengerjaannya.

Data Pemkab Badung, ada dua kontraktor yang gagal menggarap proyek sehingga membuat lima proyek yang ditangani Dinas PUPR Badung molor. Instansi inipun langsung melakukan pemutusan kontrak terhadap lima proyek yang bernilai masing-masing miliaran rupiah. Kelima proyek yang molor dan diputus kontrak yakni empat digarap PT MGK dan satu dikerjakan CV KD.

Secara rinci empat proyek bermasalah yang digarap PT MGK, adalah pembangunan RKB dan

Renovasi Halaman SD Negeri 3 Legian Rp 2.835.050.344. Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian Rp 2.191.961.000, pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani Rp 2.407.799.900 dan pembangunan Wantilan Melasti di Club Med dengan nilai Rp 1.387.894.000.

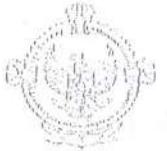
Proyek yang dikerjakan CV KD adalah pembangunan gedung dan penataan halaman Puskesmas Pembantu Punggul dengan nilai Rp 1.747.119.563. Pihak rekanan belum bisa dikonfirmasi soal ini. (gus)

Satu Proyek Denda Rp 28 Juta

KEPALA Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung IGA Arinda Trisnawati, mengatakan selain melakukan pemutusan kontrak, pihak kontraktor juga diberikan denda. Bahkan denda yang diberikan besarnya berkisar Rp 28 juta lebih.

"Dendanya sesuai dengan waktu masing-masing per kegiatan. Itu pun ada

rumusnya, tapi data riilnya di kantor," tuturnya. Selain kena sanksi putus kontrak, kontraktor ini juga terancam kena sanksi 'blacklist'. Untuk lima proyek Pemkab Badung yang saat ini terhenti akan segera dilanjutkan dengan mencari rekanan baru. Terkait pembayaran, akan dibayar sesuai pekerjaan yang belum tuntas. (gus)



Rp 1,7 Miliar untuk Alat Berat

Untuk mengangkut sampah yang semakin menumpuk, DLHK Kota Denpasar setidaknya membutuhkan penambahan tiga alat berat.

DENPASAR, NusaBali

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar gelontor Anggaran Perubahan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar sebesar Rp 1,7 miliar untuk pengadaan satu unit alat berat pengangkut sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Pengadaan ini untuk menambah dua unit alat berat yang sudah tersedia saat ini.

Kepala DLHK Kota Denpasar I Ketut

Wisada saat dikonfirmasi, Minggu (17/2) mengungkapkan, penambahan alat berat itu untuk membantu pengangkutan sampah yang selama ini masih banyak menggunakan tenaga petugas. Kata Wisada, saat ini pihaknya sudah memiliki dua alat berat namun itu tidak cukup dengan puluhan TPSS yang ada di Kota Denpasar.

Dengan pengadaan itu ia berharap ada solusi untuk mengurangi penumpukan sampah di TPSS. "Selama ini memang kita baru punya dua TPSS. Sisanya kita menggunakan tenaga petugas. Jadi untuk 2019 ini kita baru bisa pengadaan satu alat berat. Tapi saat ini kami masih berupaya menuntaskan permasalahan yang ada yakni membludak akibat TPA Suwung," ungkapnya.

Menurut Wisada, pihaknya untuk mengangkut sampah yang semakin menumpuk setidaknya membutuhkan penambahan tiga alat berat. Namun yang terealisasi baru satu alat berat. Pihaknya

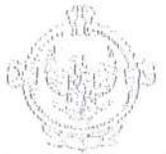
akan melakukan pengadaan secara bertahap. Apalagi anggaran saat ini tidak cukup untuk memenuhi pengadaan seluruh alat berat yang diperlukan.

Dikatakannya, anggaran cukup besar membuat pihaknya harus berupaya melakukan pengamprahan agar bisa terpenuhi keseluruhannya. "Kami terkendala dana. Kalau memang bisa tahun depan kita akan pengadaan lagi. Kalau tidak ya kami harus bersabar lagi dengan melakukan pengadaan secara bertahap," ungkapnya.

Saat ini kata dia, pihaknya juga masih berfokus pada penanganan sampah yang terus membludak karena penyempitan TPA Suwung. Jika itu masih jadi masalah tentu satu alat berat yang segera didatangkan itu juga tidak bisa dimaksimalkan pemakaiannya. Jadi yang ada saat ini, pihaknya mencari solusi ditambah penanganan sampah di pinggir jalan protokol yang belum bisa tertangani dengan tuntas. **mi**



Salah satu alat berat yang dimiliki DLHK Kota Denpasar.



Dinas PUPR Keberatan Ekskavator Dipinjam BPBD

Alat berat milik Dinas PUPR juga disewakan untuk mendatangkan uang jasa yang masuk kas daerah.

AMLAPURA, NusaBali

Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Karangasem, I Ketut Sedana Mertha, mengaku keberatan ekskavator sering dipinjam BPBD (Badan Penganggulangan Bencana Daerah).

Menurutnya, BPBD harus mengajukan anggaran pengadaan alat berat sehingga saat terjadi bencana bisa membawa ekskavator sendiri. Sebab Dinas PUPR memiliki banyak pekerjaan memerlukan alat berat.

Pernyataan keberatan Kadis PUPR Sedana Mertha itu diungkapkan saat rapat koordinasi pimpinan OPD yang dipimpin Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa di aula Kantor Bupati Karangasem, Jalan Ngurah Rai Amlapura, Senin (18/2). "Kalau BPBD terus menerus pinjam alat berat, kami tidak bisa kerja. Berikan saja anggaran kepada BPBD untuk pengadaan ekskavator, sehingga



KADIS PUPR, I Ketut Sedana Mertha (kanan) dan Kalak BPBD Ida Bagus Ketut Arimbawa saat Rapat Koordinasi di aula Kantor Bupati Karangasem, Jalan Ngurah Rai Amlapura, Senin (18/2).

begitu ada bencana BPBD langsung bisa jalan," pinta Sedana Mertha. Diikatakan, alat berat milik Dinas PUPR juga disewakan dan mendatangkan uang jasa yang masuk kas daerah. Apalagi ada target jasa sewa alat berat untuk pemasukan setiap tahun.

Wakil Bupati Artha Dipa mendukung argumen Kadis PUPR Sedana Mertha. "Memang kalau alat berat Dinas PUPR terus menerus dipinjam, tidak etis. Sebab Dinas PUPR juga menggunakan alat itu," jelas Wabup Artha Dipa. Asisten III Setda Karangasem, I Wayan Purna, berjanji menggelar rapat khusus membahas

pengadaan alat berat agar kinerja Dinas PUPR tidak terganggu gara-gara alat beratnya sering dipinjam BPBD untuk penanganan bencana. Sehingga alat berat milik Dinas PUPR tidak terganggu, bisa fokus digunakan untuk program kerja di internal Dinas PUPR.

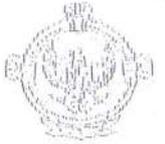
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, berdalih selama ini pinjam alat berat milik Dinas PUPR untuk penanganan bencana, terutama bencana tanah longsor yang menyebabkan warga terisolir. "Dinas PUPR jangan berpikir hanya untuk mendapatkan

jasa sewa alat berat tanpa memikirkan persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Akibat tanah longsor menyebabkan akses jalan terhambat," tegas Ida Bagus Ketut Arimbawa.

Penanganan tanah longsor yang menutup jalan, kata IB Ketut Arimbawa, adalah masalah sangat vital buat masyarakat banyak. "Pejabat selama ini belum pernah merasakan akses jalannya tertutup akibat tanah longsor. Coba kalau jalannya tertutup longsor, langsung kontak BPBD agar cepat melakukan penanganan," sindir IB Ketut Arimbawa. **k16**

Edisi : Selasa, 19, Feb, 2019

Hal : 8



Kawanan Anjing Rusak Rubber Flooring

● Dewan Soroti Revitalisasi Peninjoan Panorama Penelokan

BANGLI, TRIBUN BALI - Usai pengerjaan revitalisasi Peninjoan Panorama Penelokan pada akhir tahun 2018, sejumlah bagian bangunan ini sudah nampak rusak. Padahal objek wisata favorit wisatawan asing dan domestik ini belum diresmikan.

Pantauan di lokasi, Senin (18/2), kerusakan bangunan langsung terlihat di dua bagian lantai menurun menuju panggung utama. Lapisan lantai berbahan rubber flooring ini tampak berlubang pada sisi jalan sebelah kiri. Sedangkan sisi jalan menurun sebelah kanan, kondisinya justru lebih parah sebab lapisan tersebut telah hilang sehingga terlihat dasar lantainya.

Tak hanya pada jalan menuju panggung, kerusakan bagian bangunan yang direvitalisasi dengan anggaran Rp 12,6 miliar itu juga terlihat pada bagian dinding yang mulai timbul retakan hingga lantai panggung berbahan kayu yang bergelombang.

Ketua Komisi III DPRD Bangli, I Ketut Suastika meragukan kualitas bahan rubber flooring yang digunakan. Sebab belum genap dua bulan usai pengerjaan kondisinya sudah rusak. Ia juga mempertanyakan kualitas pemasangan lantai kayu yang tampak bergelombang.

"Kayu sebagai lantai ini harus lurus, tidak boleh melengkung. Memang jika dipaksakan dalam pemasangannya bisa terlihat lurus, namun setelah rekataannya lepas, kayu ini akan kembali pada bentuk aslinya yang melengkung. Seperti ini contohnya, ketika rekatan-

Semestinya memperhatikan luas minimal itu. Karena dengan lebar anak tangga sekarang, akan membahayakan wisatawan khususnya mereka yang menggunakan sepatu hak sehingga bisa jatuh.

I Wayan Kariyasa

Anggota Komisi III DPRD Bangli

nya lepas terlihat longgar," katanya dalam sidak tersebut.

Suastika menilai, kualitas pemasangan yang terkesan terburu-buru ini tentu berdampak pada jangka pendek kondisi bangunan. Ia menyebut, dalam waktu satu tahun ke depan ada kemungkinan pasangan kayu yang kini terlihat bergelombang akan menganga.

Anggota Komisi III lainnya, I Wayan Kariyasa mengatakan, meski secara umum ia menilai upaya revitalisasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli tergolong baik, namun proses finishing justru terkesan tergesa-gesa.

Kondisi retaknya tembok lantaran pengerutan akibat bahan bangunan yang masih basah langsung dilakukan proses finishing. Ia juga mengkritisi anak tangga yang menurutnya, tidak memperhatikan lebar minimal yakni 30 sentimeter.

"Semestinya memperhatikan luas minimal itu. Karena dengan lebar anak tangga sekarang, akan membahayakan wisatawan khususnya mereka yang menggunakan sepatu hak sehingga bisa jatuh. Jadi selain perbaikan pada lantai, kami juga mengharapkan perbaikan pada anak tangga itu demi keamanan wisatawan," ujarnya.

Kabid Bina Objek Disparbud Bangli, I Wayan Bona tidak menampik terkait kerusakan sejumlah bagian bangunan di objek wisata Peninjoan Panorama Penelokan, Kintamani. Ia mengaku telah menghubungi pihak rekanan untuk segera melakukan perbaikan.

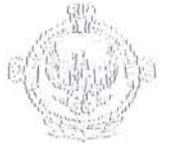
Bona menjelaskan, kerusakan saat lapisan lantai rubber flooring disebabkan oleh kawanan anjing pada malam hari. Sebab jalan menuju panggung tidak terpasang pintu. Demikian pintu sementara berbahan tripleks sudah dibuka sejak upacara pemelaspasan bangunan pada tanggal 9 Februari lalu. (mer)

Edisi

Selasa, 19, Feb, 2019

Hal

5



Sambungan



TRIBUN BALI/MUHAMMAD FREDEY MERCURY

SAGET USAK - Dewan menunjukkan kondisi rubber flooring yang rusak, Senin (18/2). Kabid Bina Objek Disparbud mengaku telah menghubungi pihak rekanan untuk segera melakukan perbaikan.

Edisi : Selasa, 19, Feb, 2019

Hal : 5